

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI IKAN DI
KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN
XIII KOTO KAMPAR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat

Penyusunan Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



YUNI KARTIKA

147310567

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 67/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Yuni Kartika**
N P M : 147310567
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Kabupaten Kampar (Study Kasus Di Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar).

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Prof.Dr.H.Yusri Munaf.,SH.M.Hum | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rizki Setiawan.,S.IP.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP.M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dra. Hj. Monalisa.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Agung Wicaksono.,MPA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Februari 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

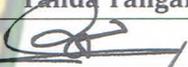
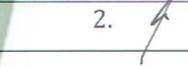
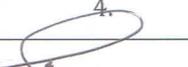
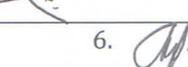
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *67* /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 13 Februari 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Februari 2019 jam 08.00 - 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yuni Kartika
NPM : 147310567
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Petani Ikan di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar).
Nilai Ujian : Angka : " *79,4* " ; Huruf : " *B+* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum	Ketua	1. 
2.	Rizki Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3.
4.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 14 Februari 2019
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERIKANAN
JLN. PROF. M. YAMIN, SH NO. 59 TELP/FAX. (0762) 20648
BANGKINANG - 28412

SURAT IZIN

No. 045/Diskan-Set/858

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA
UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, setelah membaca surat Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kampar No. 070/KKBP/2018/939, tanggal 27 Nopember 2018, perihal mohon izin melaksanakan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Penumpulan Data untuk bahan Skripsi, dengan ini memberikan izin kepada :

1. Nama : YUNI KARTIKA.
2. NIM : 147310567.
3. Universitas : Universitas Islam Riau (UIR).
4. Program Stud : Ilmu Pemerintahan.
5. Jenjang : S1.
6. Alamat : Pekanbaru
7. Judul Penelitian : Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian/pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menyerahkan foto copy hasil penelitian/pengumpulan data yang diperoleh apabila Penelitian / pengumpulan data telah selesai ke Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Demikian Izin Penelitian/pengumpulan data ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Bangkinang, 28 Nopember 2018.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAMPAR

RUSMAN AMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 199603 1 010

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR di Pekanbaru.
2. Sdr. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat.
3. Sdr. Kepala Desa Koto Mesjid di Koto Mesjid.
- ④ Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/15837
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 1890/E-UIR/27-FS/2018 Tanggal 21 November 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : YUNI KARTIKA
2. NIM / KTP : 147310567
3. Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI IKAN DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.
7. Lokasi Penelitian : DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 November 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/15837
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 1890/E-UIR/27-FS/2018 Tanggal 21 November 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : YUNI KARTIKA
2. NIM / KTP : 147310567
3. Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI IKAN DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.**
7. Lokasi Penelitian : DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 November 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yuni Kartika
NPM : 147310567
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan
Petani Ikan Di Penelitian Kabupaten Kampar
(Studi Kasus di Koto mesjid XIII Koto Kampar).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 12 Maret 2019
An. Tim Penguji,
Sekretaris,

Ketua,



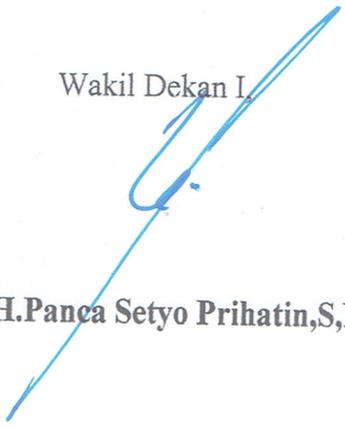
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum



Rizki Setiawan, S.IP., M.Si

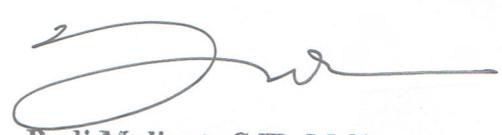
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Muliando, S.IP., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yuni Kartika
NPM : 147310567
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Koto mesjid XIII Koto Kampar).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif, dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian Komprehensif.

Pekanbaru, 10 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Monalisa, M.Si


Yendri Nazir, S.Sos. M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Budi Muliando, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yuni Kartika
NPM : 147310567
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Peneitiam Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Koto mesjid XIII Koto Kampar).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

Pekanbaru, 12 Maret 2019

Sekretaris,

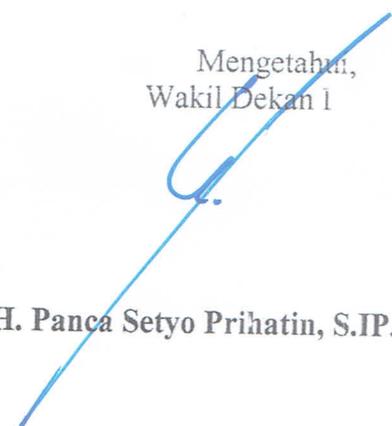

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum


Rizki Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota,


Yendri Nazir, S.Sos. M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

**PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI IKAN
DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI DESA KOTO MESJID
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR)**

ABSTRAK

Yuni Kartika

Kata kunci : pemberdayaan, Petani Ikan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar) dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan Petani Ikan Di Kabupaten Kampar oleh Dinas Perikanan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah penyadaran, penyuluhan dan peningkatan kemampuan. Tipe penelitian adalah survey deskriptif yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas perikanan kabupaten kampar, kepala bidang bidang sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan beserta jajaran seksi bidang tersebut, kepala desa koto mesjid kabupaten kampar dan masyarakat petani ikan di desa koto mesjid. Untuk melengkapi penelitian ini, maka diperlukan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara kuesioner, interview dan observasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada masyarakat petani ikan di Desa Koto mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar, dapat diketahui bahwa dari 25 responden rata-rata memberikan tanggapan cukup baik. Dalam pelaksanaan pemberdayaan oleh Dinas perikanan kepada masyarakat petani ikan di desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Kot Kampar terdapat beberapa faktor yang yang menjadi kendala atau menjadi penghambat antara lain: belum dikelolanya potensi sumberdaya manusia, belum terlaksananya kegiatan pemanfaatan dalam pengelolaan sumberdaya manusia khususnya di bidang perikanan, kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran dalam kebersihan lingkungan kolam.

ROLE OF FISHERIES IN THE EMPOWERMENT OF FISH FARMERS IN DISTRICTS KAMPAR (CASE STUDY IN KOTO MESJID VILLAGE XIII KOTO KAMPAR SUB-DISTRICTS)

ABSTRACT

Yuni Kartika

Keywords: empowerment, Fish Farmers

This study aims to find out and analyze the Role of Fisheries Offices in Fish Farmer Empowerment in Kampar District (Case Study in Koto Mesjid village XIII Koto Kampar Sub-Districts) and to find out and analyze obstacles encountered in the implementation of Fish Farmer empowerment in Kampar District by the Fisheries Service. In this study the indicators used were awareness, counseling and capacity building. This type of research is a descriptive survey that prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main standard language to analyze the empirical conditions of the objectivity of the purpose of the study at the location under study. The population in this study was the head of the fisheries department of Kampar district, the head of the field of human resources and fisheries institutions along with the ranks of the fields, the head of the Koto village of Kampar District Mosque and the fish farming community in the Koto Mosque village. To complete this research, primary and secondary data is needed. Data collection can be done by means of questionnaires, interviews and observations. While the data analysis techniques used are frequency tables. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the implementation of empowerment by the Fisheries Office of the Kampar District in the fish farming community in Koto Village, District XIII Koto Kampar, can be seen that from 25 respondents the average gave a fairly good response. In the implementation of empowerment by the Department of Fisheries to fish farming communities in the village of Koto Mesjid Kecamatan XIII Kampar City there are several factors that become obstacles or become obstacles, among others: not yet managed human resource potential, not yet implemented utilization activities in human resource management, especially in fisheries midwives, lack of community participation and awareness in the cleanliness of the pool environment.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Koto mesjid XIII Koto Kampar).”

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Tentunya selama penyusunan Skripsi ini, maupun selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Riau, tidak sedikit bantuan, dorongan dan semangat yang penulis terima baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si dan Bapak Yenri Nazir, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing dengan ketulusan hati dan kesabarannya yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu serta karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang turut membantu dalam kelancaran administrasi penyelesaian usulan penelitian ini.
6. Secara Khusus penulis persembahkan terutama untuk Ayahanda dan Ibunda tersayang, adik-adik serta seluruh keluarga besar tercinta, atas segala kasih sayang, perhatian, dorongan, bantuan baik moril maupun materil dan do'a restu yang tidak ternilai harganya.
7. Kepada seluruh sahabat dan kawan-kawan seperjuangan yang telah memberi dukungan dan membantuk memberi pencerahan terhadap penyelesaian usulan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan, dan semoga penulisan usulan penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Akhir kata

penulis mengucapkan selamat membaca dan semoga materi yang ada dalam Skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Januari 2019

Penulis

Yuni Kartika



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	37
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	37
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	39
A. Studi Kepustakaan.....	39
1. Konsep Pemerintah dan Ilmu Pemerintah.....	39
2. Konsep peran.....	41
3. Konsep Organisasi	43
4. Konsep manajemen	44
5. Konsep manajemen sumberdaya manusia	47
6. Konsep Pemberdayaan	50
7. Konsep Pembinaan.....	54
8. Konsep Pelatihan.....	55
9. Konsep Pengawasan	57
B. Kerangka Pikir	60
C. Konsep Operasional	61
D. Operasional Variabel	62
E. Teknik Pengukuran	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Tipe Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian.....	67
C. Populasi dan Sampel	68
D. Teknik Penarikan Sampel	69
E. Jenis dan Sumber Data	70
F. Teknik Pengumpulan Data	70
G. Teknik Analisis Data.....	72

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	73
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	74
A. Gambaran Desa Koto Mesjid	74
B. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	76
C. Uraian Tugas Dinas Perikanan	79
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Identitas Responden	86
B. Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan	88
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan Di Desa Koto Mesjid Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	105
BAB VI PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Tabel Program Pelaksanaan Pemberdayaan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada Petani Ikan pada Tahun 2016 dan 2017.	22
I.2	Tabel Jumlah Kelompok Masyarakat Petani Ikan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar pada tahun 2016.	25
I.3	Data kelompok perikanan Penerima PUMP di Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 2016 – 2017.	26
I.4	Data Luas Lahan Kelompok Petani Ikan Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar pada Tahun 2016.	31
II. I	Operasional variabel penelitian tentang Peranan Dinas perikanan Kabupaten Kampar dalam Memperdayakan masyarakat petani ikan di Desa Koto mesjid Kecamatan XIII Koto Mesjid.	62
III. 1	Jumlah populasi dan sampel penelitian.	69
III.2	Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar).	73
IV.1	Identitas Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar berdasarkan usia.	77
IV.2	Identitas Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar berdasarkan	

jenis kelamin	78
IV.3 Identitas Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	
berdasarkan tingkat pendidikan	78
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur	86
V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	87
V.3 Distribusi tanggapan responden penelitian tentang Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan	91
V.4 Distribusi tanggapan responden penelitian tentang Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan	96
V.5 Distribusi tanggapan responden penelitian tentang Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan	100
V.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	15
I.11 Kerangka pikir Tentang Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar).....	60
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah, Daerah dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (UU No 23 Tahun 2014).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika undang-undang Nomor 32 tahun 2004 digantikan dengan undang-undang No 23 tahun 2014. Era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Sedangkan makna dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam pasal yang sebelumnya tak diatur dalam UU sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga macam:

1. Urusan pemerintahan absolut;
2. Urusan pemerintahan konkuren; dan
3. Urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Pasal 10 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi enam hal. Yaitu, urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun perihal keenam hal tersebut. Urusan enam bidang tersebut mutlak menjadi domain pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun.

Adapun urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah Kabupaten atau Kota. Urusan pemerintahan konkuren ini masih dibagi lagi menjadi dua: urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Yang terkait dengan pelayanan dasar misalnya soal pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Yang tidak terkait dengan pelayanan dasar antara lain soal tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Urusan pemerintahan pilihan ini meliputi antara lain soal pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Semua urusan pemerintahan konkuren tersebut dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, ekstrenalitas, dan kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan umum antara lain soal pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan menjadi domain pemerintah daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hal yang berkaitan dengan Perikanan termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Konkuren Pilihan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potesial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karna itulah manusia juga perlu dimanajemen.

Manajemen merupakan proses untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen bisa sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis juga sebagai suatu kreativitas pribadi yang disertai suatu keterampilan.

Menurut Marihot (dalam Danang, 2013;1) manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Berdasarkan definisi diatas pula (Mariot:2002) mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mendapatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dalam meningkatkan perekonomian daerah maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk dapat berkembang dan membuka usaha sendiri. Pemberdayaan dalam berbagai literatur dipandang sebagai sebuah proses dan sekaligus sebuah tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga dipandang sebagai proses yang lebih bernuansa humanis, sebagaimana dinyatakan oleh Kusnama (dalam Hikmat, 2001;11) mengemukakan, bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial budaya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, tampak bahwa hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Oleh karena itu salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan terhadap masyarakat tentang bagaimana cara menunjang perekonomian didaerah tersebut maka melalui pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tersebut berperan penting dalam pengembangan usaha pembudidayaan ikan yang akan dikelola oleh masyarakat atau petani ikan tersebut.

Budidaya ikan merupakan usaha pemeliharaan atau kegiatan produktivitas perairan yang dihasilkan oleh sekelompok atau individu dalam bentuk pembenihan, pembesaran dan pengolahan disegala aspek akuatik untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam waktu tertentu (Nurhasan, 2014).

Banyak budidaya ikan mengalami kegagalan dalam usaha tetapi semua itu tidak menjadi suatu kekecewaan akan tetapi ini akan menjadi hal baru agar para pembudidaya harus berhati-hati dalam melakukan pemeliharaannya. Biasanya yang menjadi kendala dalam membudidayakan ikan seringkali terjadi seperti

lingkungan yang kurang baik, cuaca yang tidak stabil/tidak normal, kondisi air tidak bagus, kurang memahami dalam teknik budidaya dan lain-lain sebagainya.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang potensi perikananannya cukup besar untuk dikembangkan. Sektor perikanan di Kabupaten Kampar menjadi sumber pertumbuhan baru yang sangat strategis untuk dikembangkan, guna menghasilkan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar dapat memprioritaskan pembangunan daerahnya pada sektor ini. Pentingnya mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Kampar mengingat daerah ini memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Budidaya perikanan merupakan usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Propinsi Riau dan berpenduduk ± 793.005 jiwa (SP2015).

Kabupaten Kampar adalah salahsatu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah Di Provinsi Riau. Desa Koto Masjid adalah nama suatu desa yang terletak diwilayah kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Nama dari Koto Masjid di ambil dari nama

sebuah dusun atau kampung pertama semasa Koto Masjid Masih bergabung dengan Desa Pulau Gadang(sebelum pemekaran desa). Sekarang,wilayah lokasi dari dusun tersebut berada di genangan waduk PLTA Koto Panjang.

Desa Koto Masjid merupakan Desa Pemekaran dari Desa Pulau Gadang pada tahun 1999 sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 247 Tahun 1999 yang pada saat itu dengan jumlah 343 kepala keluarga (KK) dan jumlah penduduk 1.239 jiwa.

Desa Koto Masjid terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar,Kabupaten Kampar provinsi Riau yang berbatas dengan:

- Sebelah utara dengan Desa Batu Langka, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah timur dengan Desa Silam, Kecamatan Bangkinang Barat
- Sebelah selatan dengan Merangin, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah barat dengan Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Luas wilayah Desa Koto Masjid adalah 425,5 ha. Berupa daratan yang bertopografi perbukitan. Daratan dimanfaatkan sebagai lahan perikanan (kolam darat). Iklim desa Koto Masjid, sebagaimana desa - desa lain yang ada di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap usaha perikanan yang ada di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Kondisi lingkungan Desa Koto Masjid merupakan wilayah yang berada di pingiran waduk PLTA Koto Panjang. Hal ini menjadikan Desa Koto Masjid selain sebagai pusat pengembangan perikanan kolam darat, juga berpotensi dalam

pengembangan keramba jaring apung (KJA) di waduk PLTA Koto Panjang. Perkembangan bidang perikanan Koto Masjid juga tidak terlepas dari dukungan sumber air yang sangat memadai. Pada awalnya Koto Masjid Tidak memiliki sumber airdan tergolong daerah yang kurang baik untuk budidaya ikan. Namun, sejak ditemukannya sumber mata air berupa air bawah tanah yang sangat melimpah, Desa Koto Masjid berubah menjadi salah satu kawasan budidaya airtawar yang cukup dikenal dengan pemanfaatan air melalui sumur bor.

Usaha budidaya ikan patin di Desa Koto Masjid di mulai dari tahun 2003. Sejak tahun 2003 hingga 2012 PT. Telkom Pekanbaru telah menyalurkan modal sebesar Rp 8 miliar kepada 185 UMK di Desa Koto Masjid dan Desa yang terletak disebelahnya yaitu Desa Pulau Gadang. Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau, Program ini telah berhasil menyerap 216 tenaga kerja dengan penghasilan 5 - 6 juta perbulan. Bantuan yang telah diberikan oleh PT. Telkom Pekanbaru kepada masyarakat Desa Koto Masjid dan Desa Pulau Gadang ini berupa pinjaman, dengan cara memberikan kepercayaan dari salah seorang yang menjadi perwakilan dari setiap kelompok usaha yang ada untuk melaporkan perkembangan keuangan secara rutin dan transparan. Setiap wakil dari kelompok usaha yang ada juga diberikan tanggung jawab untuk mengembalikan angsuran pinjaman kepada PT. Telkom Pekanbaru. Dan hingga saat ini injaman tersebut telah dikembalikan oleh masyarakat Desa Koto Masjid. Beberapa tahun kemudian ternyata perkembangan usaha ini cukup pesat dan banyak di ikuti oleh penduduk. Mereka membentuk kelompok - Kelompok usaha tani, khususnya dalam usaha budidaya ikan patin.

Usaha perikanan di Desa Koto Masjid ini sangat berhasil, sehingga mampu menambah penghasilan kelompok - kelompok usaha yang ada hingga memperbaiki pendapatan bagi mereka. Oleh karena usaha perikanan tersebut sangat berkembang pesat, penduduk desa terinspirasi untuk membuka usaha serupa dengan membuat kolam - kolam ikan patin yang baru. Bahkan desa ini telah meraih penghargaan adi bakti mina bahari pembudidaya teladan, Desa juara 1 pengolahan patin tingkat Provinsi Riau dan ditetapkan sebagai desa pengembangan terpadu.

Saat ini di Desa Koto Masjid mendapatkan julukan Kampung Patin, karena hampir 85% masyarakatnya memiliki usaha kolam ikan patin dan desa tersebut memiliki output panen ikan patin segar sekitar 4 ton setiap harinya. Usaha budidaya perikanan ikan patin di Desa Koto Masjid Sangat berkembang pesat.

Selain menghasilkan ikan patin segar, Desa Koto Masjid Juga menghasilkan bibit ikan patin, olahan salai ikan patin, kerupuk ikan patin, dan juga nugget ikan patin. Saat ini telah dibangun sentra pengolahan ikan patin dengan luas lahan sekitar 3 hektar. Dengan harapan mampu menyerap seluruh panen ikan patin Desa KotoMasjid yang selalu meningkat. Desa Koto Masjid di yakini akan dapat menjadi desa percontohan bagi desa di Riau bahkan bagi daerah lain di Indonesia dalam peningkatan tarafekonomi masyarakat. Karena apa yang dilakukan Desa Koto Masjid dalam bidang perikanan sudah membuktikan mereka bisa menaikkan ekonomi masyarakatnya. Desa Koto Masjid merupakan desa yang awalnya merupakan desa transmigrasi penduduk lokal akibat pembangunan PLTA ini

adalah desa miskin. Namun dengan pengembangan perikanan ini membuat desa ini menjadi desa yang sejahtera di Kampar. Desa ini menjadi desa “Kampung Patin” dengan motto ”tiada rumah tanpa kolam ikan”.

Berasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar memuat pembentukan dan susunan pada pasal 3 ayat 1 dan 6 yaitu :

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
 - b. Sekretariat DPRD, tipe A; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten;
 - c. Inspektorat, tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Dinas Kesehatan, tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian dan Bidang Statistik;
14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
15. Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan kebudayaan;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
18. Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;;

19. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 20. Dinas Perkebunan, Peternakan dan kesehatan hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan, Peternakan dan kesehatan hewan;
 21. Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Bidang Tenaga Kerja;
- e. Badan daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana;

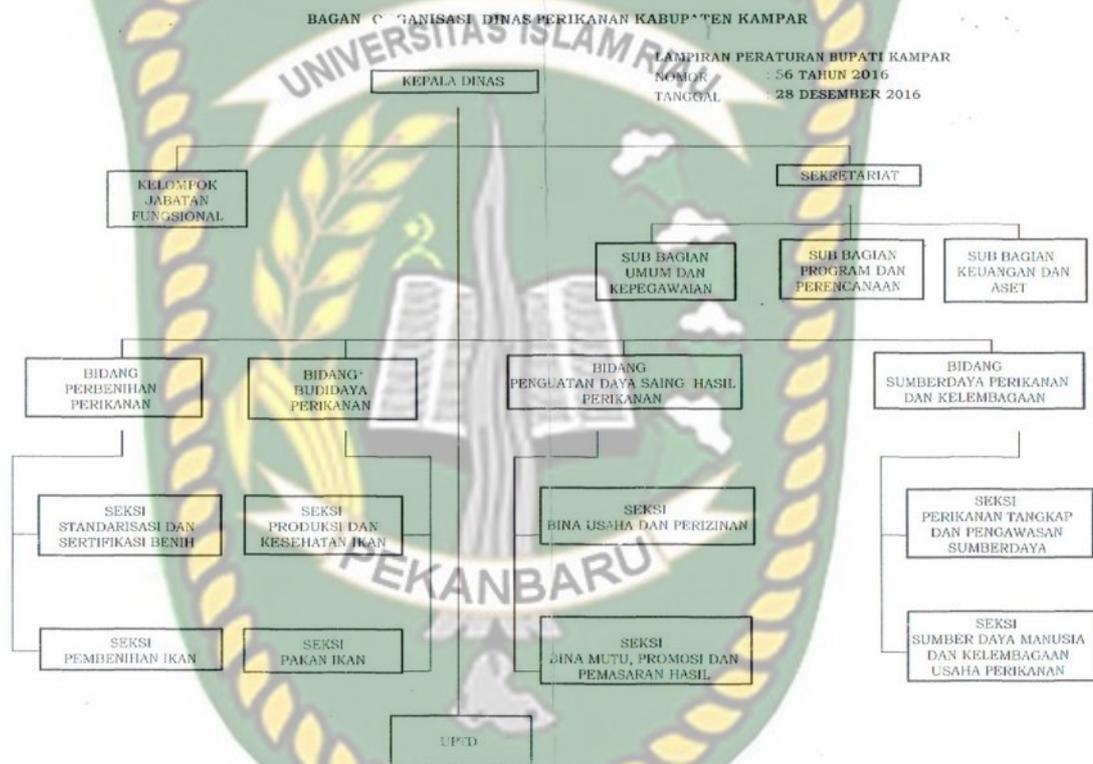
f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Kampar Kiri, Tipe A;
2. Kecamatan Tapung Hilir, Tipe A;
3. Kecamatan Tapung Hulu, Tipe A;
4. Kecamatan Tapung, Tipe A;
5. Kecamatan Tambang, Tipe A;
6. Kecamatan Kampar, Tipe A;
7. Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Tipe A;
8. Kecamatan Siak Hulu, Tipe A;
9. Kecamatan XIII Koto Kampar, Tipe A;
10. Kecamatan Rumbio Jaya, Tipe A;
11. Kecamatan Kampar Utara, Tipe A;
12. Kecamatan Kampar Timur, Tipe A;
13. Kecamatan Salo, Tipe A;
14. Kecamatan Bangkinang, Tipe A;
15. Kecamatan Kuok, Tipe A;
16. Kecamatan Bangkinang Kota, Tipe A;
17. Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Tipe A;
18. Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Tipe A;
19. Kecamatan Gunung Sahilan, Tipe A;
20. Kecamatan Perhentian Raja, Tipe A;
21. Kecamatan Koto Kampar hulu, Tipe A;



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata Kerja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Gambar I.1 : Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten kampar 2018.

Berdasarkan peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 dijelaskan tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016.

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan menurut Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016 yaitu :

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Terdiri :

1. Kepala Dinas
2. Sekrteriat Terdiri Dari :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program Dan Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
3. Bidang Perbenihan Perikanan Terdiri Dari :
 - a. Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi Benih
 - b. Seksi Pembenuhan Ikan
4. Bidang Budidaya Perikanan Terdiri Dari :
 - a. Seksi Produksi Dan Kesehatan Ikan
 - b. Seksi Pakan Ikan
5. Bidang Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan terdiri Dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Dan Perizinan
 - b. Seksi Bina Mutu, Promosi Dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Bidang Sumber Daya Perikanan Dan Kelembagaan Terdiri Dari :



- a. Seksi Perikanan Tangkap Dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
- b. Seksi Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Usaha Perikanan.

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan Kabupaten Kampar Memuat Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas Perikanan pada pasal 5 yaitu :

- (1) Dinas perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, kewenangan dibidang perikanan
 - b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten
 - c. Melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis dibidang perikanan
 - d. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang perikanan
 - e. Melakukan pengelolaan, pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang perikanan

- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdaya perikanan
- g. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan monitoring kegiatan perikanan tangkap
- h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi dinas
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- k. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai
- l. Pengelolaan UPT Dinas

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Memuat Tugas Dan Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan Dan Kelembagaan pada pasal 19 yaitu :

- (1) Bidang sumber daya perikanan dan kelembagaan di pimpin oleh seorang Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan sumberdaya perikanan dan perlindungan, pengendalian penyakit, kesehatan dan karantina ikan, pengembangan perikanan tangkap dan melaksanakan kebijakan penguatan kelembagaan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud di ayat (1) adalah :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang sumberdaya perikanan dan kelembagaan
- b. Perumusan kebijakan teknis perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, dan karantina ikan serta standarisasi dan pengawasan mutu
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, kesehatan dan karantina ikan serta standarisasi dan pengawasan mutu
- d. Penyelenggaraan perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, dan karantina ikan serta standarisasi dan pengawasan mutu
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, dan karantina ikan serta penguatan kelembagaan perikanan
- f. Penyusunan program, perumusan, pengidentifikasi dan pengelolaan para nelayan dan perariran umum daratan (PUD)
- g. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengayaan *stuck* ikan melalui *restucking*, pemulihan dan domestifikasi jenis ikan lokal
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- i. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai
- j. Pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Memuat Tugas Dan Fungsi Seksi Bidang Sumberdaya Manusia Dan Kelembagaan Perikanan pada pasal 21 yaitu :

- (1) Seksi sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan dan melaksanakan kebijakan teknis penguatan kelembagaan perikanan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis managerial pelaku usaha perikanan
 - c. Melaksanakan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat perikanan
 - d. Memfasilitasi kerja sama kelompok masyarakat perikanan dengan pihak ketiga (BUMN / BUMD dan pengusaha perikanan)
 - e. Melaksanakan pelatihan terhadap tenaga teknis perikanan dan pelaku usaha perikanan
 - f. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan
 - g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan SDM dan kelembagaan perikanan
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kelembagaan perikanan

- i. Melaksanakan *monitoring* evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan perikanan
- j. Melaksanakan penilaian dan pengukuhan kelas kelompok
- k. Menyelenggarakan pertemuan rutin bulanan dan arahan bersama tenaga penyuluh perikanan
- l. Melakukan lomba kelompok utama dan pelaku usaha bidang perikanan ditingkat Kabupaten
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- n. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 diatas, ditegaskan bahwa salah satu tugas dari Seksi Bidang Sumberdaya Manusia Dan Kelembagaan Perikanan adalah melaksanakan kebijakan teknis penguatan kelembagaan perikanan yaitu kelompok-kelompok dari masyarakat petani ikan. Bidang ini sangat strategis mengingat bahwa Kampar adalah penyumbang produksi ikan terbesar di Riau terutama di Desa Koto Mesjid yang merupakan lokasi yang paling banyak memiliki kelompok petani ikan.

Tabel I.1 : Program Pelaksanaan Pemberdayaan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Pada Petani Ikan Pada Tahun 2016 dan 2017.

NO.	Nama Program	Tahun		Bantuan Program	Ket.
		2016	2017		
1.	Pengembangan Budidaya	Desa Koto Mesjid	Desa Koto Tuo	Bantuan berupa Pakan dan Bibit	Terlaksana
2.	Perlindungan Sumber Daya Hayati Perikanan	Desa Koto Mesjid	Desa Koto Tuo	Bantuan berupa Sampan dan Jaring	Terlaksana
3.	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Desa Koto Mesjid	Desa Koto Tuo	PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan)	Terlaksana
4.	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi	Desa Koto Mesjid	Desa Koto Tuo	KUKM	Terlaksana

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten kampar 2018.

Berdasarkan tabel diatas tentang program pelaksanaan pemberdaayaan Dinas Perikanan Kabupeten Kampar Pada Petani Ikan pada tahun 2016 dan 2017 dapat disimpulkan bahwa Dinas perikanan kabupeten Kampar melakukan 4 pemberdayaan pada tahun 2016 dan 2017, yaitu :

1. Pengembangan budidaya yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Desa Koto Mesjid dan tahun 2017 di Desa Koto Tuo, adapun bantuan yang diberikan berupa Pakan dan bibit.
2. Perlindungan Sumber Daya hayati yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Desa Koto Mesjid dan pada tahun 2017 di desa Koto Tuo, adapun bantuan yang diberikan berupa Sampan dan Jaring.
3. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Desa Koto Mesjid dan pada tahun 2017 di Desa Koto Tuo, adapun bantuan yang diberikan yaitu PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan). PUMP adalah program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan.
4. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Desa Koto Mesjid dan pada tahun 2017 di Desa Koto Tuo, adapun bantuan yang diberikan yaitu KUKM (Koperasi Usaha Kecil Menengah). KUKM adalah program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha pemula untuk mengembangkan usahanya.

Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar merupakan program yang menggunakan sistem dana bergulir, salah satu programnya yaitu pengembangan budidaya dan perlindungan sumber daya hayati perikanan. Dalam program pengembangan budidaya maupun program perlindungan sumber daya hayati perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memberikan bantuan berupa pakan dan bibit serta sampan dan jaring yang diperlukan oleh para petani ikan. Namun tidak semua petani ikan menerima bantuan yang diberikan, karena sebagian petani ikan yang merasa sudah mampu dan dapat mencukupi kebutuhan kelompoknya sehingga tidak ikut serta dalam penerimaan bantuan yang diberikan.

Selanjutnya, dalam program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Kampar mengembangkan program nasional yang berasal dari Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan adalah program yang menyalurkan bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dimana para penerima bantuan tersebut harus mengikuti prosedur persyaratan yang telah dijelaskan pada Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 2/PERMEN-KP/2013 Bab 3 yaitu Seleksi KUKP calon penerima PNPM Mandiri KP.

Sedangkan pada program optimalisasi dan pemasaran produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yaitu berupa bantuan dana yang diperuntukkan untuk Wirausaha Pemula, berdasarkan keputusan Menteri Koperasi Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Nomor 33/Kep/M.KUKM/XII/2016 Tentang Penetapan Perogram Bantuan Dana Bagi Koperasi Pemula dan Perogram Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula. Selain mendapatkan bantuan dana, bantuan lain yang juga diberikan berupa pembekalan seperti rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewirausahaan yang dapat di lakukan melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Magang. Setiap pelaksanaan program pemberdayaan tersebut, Dinas menempatkan beberapa tenaga PPL untuk mengawasi serta menjalankan program-program yang ada.

Tabel I.2 : Tabel Jumlah Kelompok Masyarakat Petani Ikan di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar pada tahun 2016.

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA
1.	Koto Patin	13
2.	Barkah	13
3.	Sejati	13
4.	Patin Mandiri	13
5.	Perikanan Sejahtera	10
6.	Kampung Patin Sejahtera	14
7.	Karya Muda	10
8.	Patin Mandiri	10
9.	Sejahtera	10
10.	Talau Jaya	14
11.	Lasano Danau Indah	14
12.	Harapan Sejahtera	15
13.	Puiso Patin	10
14.	Mitra Salai	8
15.	Salai Patin	9
16.	Kim Salai	9
17.	Salai Dua Putri	8
18.	Rezqi Salai	9
19.	Dua Saudara	8
20.	Alfa Salai	10
21.	Kampar Taqwa	8
22.	Nugget Sukaku	5
23.	Fita Rasa Abon	5
24.	Bakso Patin Mandiri	5
25.	Pudung Anunggraha	5
Jumlah		252 Orang

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten kampar 2018

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada XIII Koto Kampar khususnya di Desa Koto Masjid memiliki sebanyak 25 Kelompok petani ikan dan memiliki kurang lebih 252 anggota untuk keseluruhan kelompok, yang

mana diberi pemberdayaan serta pembinaan oleh Bidang Sumber Daya Perikanan Dan Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Tabel I.3: Data kelompok perikanan Penerima PUMP di Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 2016 – 2017

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten kampar 2018

No	Desa	Nama Kelompok	Tahun Berdiri	Komoditas	Nama Program	Tahun Penerimaan	Produksi (kg)		Harga Jual Rata - rata	Pendapatan dari Perikanan (Rp)	
							Awal	Akhir		Awal	Akhir
1	Koto Mesjid	Koto Patin	2006	Ikan Asap	PUMP	2016	4.679	8.610	60.000	280.740.000	516.600.000
2	Koto Mesjid	Barkah	2001	Nugget Ikan	PUMP	2016	190	220	40.000	7.600.000	8.800.000
3	Koto Mesjid	Sejati	2011	Ikan Asap	PUMP	2016	1.312	2.370	60.000	78.720.000	142.200.000
4	Koto Mesjid	Patin Mandiri	2011	Ikan Asap	PUMP	2016	50	123	60.000	2.500.000	6.150.000
5	Koto Mesjid	Puiso Patin	2009	Pemasaran Ikan	PUMP	2016	80	420	16.000	1.280.000	6.720.000
6	Koto Tuo	Perikanan Makmur	2001	Ikan Asap	PUMP	2017	3.740	4.700	60.000	224.400.000	282.000.000
7	Koto Tuo	Maju Bersama	2006	Nugget Ikan	PUMP	2017	190	220	40.000	7.600.000	8.800.000
8	Koto Tuo	Perikanan Jaya	2007	Kerupuk Ikan	PUMP	2017	141	240	70.000	9.870.000	16.800.000
9	Koto Tuo	Usaha Perikanan	2010	Kerupuk Ikan	PUMP	2017	62	143	70.000	4.340.000	10.010.000

Berdasarkan data tabel diatas tentang Data kelompok perikanan Penerima PUMP di Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 2016 – 2017 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 telah dilaksanakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar di Desa Koto Mesjid sebanyak 5 Kelompok petani ikan. Adapun kelompok yang turut pada pelaksanaan program ini di Desa Koto Mesjid, yaitu :

1. Koto Patin

Kelompok Koto Patin ini telah berdiri sejak tahun 2006 dan produk yang dihasilkan berupa Ikan Asap atau yang dikenal sebagai Ikan Salai. Produksi ikan sejak awal memulai usaha lebih kurang sebanyak 4.679 Kg sedangkan sekarang kelompok Koto Patin telah menghasilkan lebih kurang 8.610Kg dengan kisaran harga Rp. 60.000 /Kg (enam puluh ribu rupiah) dengan pendapatan pertama Rp. 280.740.000 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) hingga sekarang pendapatan dari Kelompok Patin mencapai Rp. 516.600.000 (lima ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

2. Barkah

Kelompok Barkah ini telah berdiri sejak tahun 2011 dan produk yang dihasilkan berupa Nugget Ikan. Produksi olahan Nugget sejak awal memulai usaha lebih kurang sebanyak 190 Kg sedangkan sekarang kelompok Barkah telah menghasilkan lebih kurang 220 Kg dengan kisaran harga Rp. 40.000 /Kg (empat puluh ribu rupiah) dengan pendapatan pertama Rp. 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) hingga sekarang pendapatan dari kelompok Barkah mencapai Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Sejati

Kelompok Sejati ini telah berdiri sejak tahun 2011 dan produk yang dihasilkan berupa Ikan Asap atau yang dikenal sebagai Ikan salai. Produksi ikan sejak awal memulai usaha lebih kurang sebanyak 1.312 Kg sedangkan sekarang kelompok Barkah telah menghasilkan lebih kurang 2.370 Kg dengan kisaran harga Rp.

60.000 /Kg (empat puluh ribu rupiah) dengan pendapatan petama Rp. 78.720.000 (tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hingga sekarang pendapatan dari kelompok Sejaati mencapai Rp. 142.200.000 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

4. Patin Mandiri

Kelompok Patin Mandiri ini telah berdiri sejak tahun 2011 dan produk yang dihasilkan berupa Ikan Asap atau yang dikenal sebagai Ikan salai. Produksi ikan sejak awal memulai usaha lebih kurang sebanyak 50 Kg sedangkan sekarang kelompok Patin Mandiri telah menghasilkan lebih kurang 123 Kg dengan kisaran harga Rp. 60.000 /Kg (empat puluh ribu rupiah) dengan pendapatan petama Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga sekarang pendapatan dari kelompok Patin Mandiri mencapai Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Puiso Patin

Kelompok Puiso Patin ini telah berdiri sejak tahun 2009 dan produk yang dihasilkan berupa Pemasaran Ikan yaitu Ikan konsumsi. Produksi ikan sejak awal memulai usaha lebih kurang sebanyak 80 Kg sedangkan sekarang kelompok Puiso Patin telah menghasilkan lebih kurang 480 Kg dengan kisaran harga Rp. 16.000 /Kg (enam belas ribu rupiah) dengan pendapatan petama Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga sekarang pendapatan dari kelompok Puiso Patin mencapai Rp. 6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya, pada tahun 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melaksanakan program pemberdayaan di Desa Koto Tuo. Pada Desa Koto Tuo terdapat sebanyak 4 kelompok petani ikan yang turut pada pelaksanaan program pemberdayaan ini, yaitu :

1. Perikanan Makmur

Kelompok Perikanan Makmur ini telah berdiri sejak tahun 2001 dan produk yang dihasilkan berupa Ikan Asap atau yang dikenal sebagai Ikan salai. Produksi ikan sejak awal memulai usaha lebih kurang sebanyak 3.740 Kg sedangkan sekarang kelompok Perikanan Makmur telah menghasilkan lebih kurang 4.700 Kg dengan kisaran harga Rp. 60.000 /Kg (enam puluh ribu rupiah) dengan pendapatan petama Rp. 224.400.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) hingga sekarang pendapatan dari kelompok Perikanan Makmur mencapai Rp. 282.000.000 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

2. Maju Bersama

Kelompok Maju Bersama ini telah berdiri sejak tahun 2006 dan produk yang dihasilkan berupa Nugget Ikan. Produksi olahan Nugget sejak awal memulai usaha lebih kurang sebanyak 190 Kg sedangkan sekarang kelompok Maju Bersama telah menghasilkan lebih kurang 220 Kg dengan kisaran harga Rp. 40.000 /Kg (empat puluh ribu rupiah) dengan pendapatan petama Rp. 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) hingga sekarang pendapatan dari kelompok Maju Bersama mencapai Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Perikanan Jaya

Kelompok Perikanan Jaya ini telah berdiri sejak tahun 2007 dan produk yang dihasilkan berupa olahan kerupuk ikan. Produksi olahan sejak awal memulai usaha lebih kurang sebanyak 141 Kg sedangkan sekarang kelompok Perikanan Jaya telah menghasilkan lebih kurang 240 Kg dengan kisaran harga Rp. 70.000 /Kg (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pendapatan petama Rp. 9.870.000 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga sekarang pendapatan dari kelompok Perikanan Jaya mencapai Rp. 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Usaha Perikanan

Kelompok Usaha Perikanan ini telah berdiri sejak tahun 2010 dan produk yang dihasilkan berupa olahan kerupuk ikan. Produksi olahan sejak awal memulai usaha lebih kurang sebanyak 62 Kg sedangkan sekarang kelompok Usaha Perikanan telah menghasilkan lebih kurang 143 Kg dengan kisaran harga Rp. 70.000 /Kg (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pendapatan petama Rp. 4.340.000 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) hingga sekarang pendapatan dari kelompok Usaha Perikanan mencapai Rp. 10.010.000 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah).

Pada Desa Koto Masjid terdapat beragam Komoditas dari 25 kelompok petani ikan yang ada, adapun jenis-jenis komoditas tersebut, yaitu :

1. Ikan Asap
2. Mpek – mpek

3. Nugget Ikan
4. Kerupuk ikan
5. Bakso Ikan
6. Pemasaran Ikan

Tabel 1.4 : Data Luas Lahan Kelompok Petani Ikan Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar pada Tahun 2016

No	Nama Kelompok	Luas Lahan/Unit Pengolahan Ikan	
		Besaran	Unit
1.	Koto Patin	7 x 8	Unit
2.	Barkah	4 x 5	Unit
3.	Sejati	4 x 5	Unit
4.	Patin Mandiri	6 x 6	Unit
5.	Perikanan Sejahtera	6 x 6	Unit
6.	Kampung Patin Sejahtera	4 x 5	Unit
7.	Karya Muda	7 x 8	Unit
8.	Patin Mandiri	7 x 8	Unit
9.	Sejahtera	4 x 5	Unit
10.	Talau Jaya	4 x 6	Unit
11.	Lasano Danau Indah	4 x 5	Unit
12.	Harapan Sejahtera	6 x 6	Unit
13.	Puiso Patin	4 x 5	Unit
14.	Mitra Salai	4 x 6	Unit
15.	Salai Patin	7 x 8	Unit
16.	Kim Salai	6 x 6	Unit
17.	Salai Dua Putri	4 x 6	Unit
18.	Rezqi Salai	4 x 6	Unit
19.	Dua Saudara	4 x 6	Unit
20.	Alfa Salai	4 x 6	Unit
21.	Kampar Taqwa	4 x 6	Unit
22.	Nugget Sukaku	6 x 6	Unit
23.	Fita Rasa Abon	7 x 8	Unit
24.	Bakso Patin Mandiri	6 x 6	Unit
25.	Pudung Anunggraha	7 x 8	Unit

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten kampar 2018

Berdasarkan data tabel diatas tentang luas lahan yang dimiliki oleh kelompok petani ikan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar sangat beragam, ukuran lahan yang paling kecil adalah 4 x 5 M dimiliki sebanyak 6 Kelompok Petani Ikan, sedangkan ukuran lahan terbesar adalah 7 x 8 M dimiliki sebanyak 6 Kelompok Petani Ikan.

Desa Koto Mesjid merupakan Desa dengan jumlah kelompok petani terbanyak di Kabupaten Kampar dengan beragam komoditas yang dimiliki tiap kelompoknya, pendapatan yang dihasilkan tiap kelompok pun berbeda – beda. Adapun uraian pendapatan berdasarkan jenis komoditas yang dimiliki oleh petani ikan di Desa Koto Mesjid sebagai berikut :

1. Panen Ikan

a. Panen Bibit

Ukuran Ikan Patin : 2,50 cm

Volume produksi : 40.000 ekor

Siklus produksi : 21 Hari

Harga Bibit : Rp. 100 /ekor.

Pendapatan per-panen

= @ Rp. 100 x 40.000 ekor = Rp. 4.000.000

Dengan jumlah kolam ikan rata – rata 6 unit dengan ukuran sebagai berikut :

30 m x 30 m = 40.000 ekor

$$= @ \text{ Rp. } 4.000.000 \times 6 = \text{ Rp. } 24.000.000$$

b. Panen Konsumsi

Perkiraan hasil perhitungan panen

3 ekor /Kg

$$= 40.000 \text{ ekor} : 3 \text{ ekor} = 13.000 \text{ ekor.}$$

$$13.000 \text{ ekor} \times \text{Rp. } 16.000 = \text{Rp. } 208.000.000$$

2. Ikan Asap

Perkiraan hasil perhitungan

4 ekor /Kg

$$= 40.000 \text{ ekor} : 4 = 10.000 \text{ ekor.}$$

$$10.000 \text{ ekor} \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 600.000.000$$

3. Bakso Ikan

Perkiraan hasil perhitungan

3 ekor /Kg

$$= 40.000 \text{ ekor} ; 3 = 13.000 \text{ ekor}$$

$$13.000 \text{ ekor} \times \text{Rp. } 40.000 = \text{Rp. } 520.000.000$$

4. Nugget Ikan

Perkiraan hasil perhitungan

3 ekor /Kg



= 40.000 ekor ; 3 = 13.000 ekor

13.000 ekor x Rp. 40.000 = Rp. 520.000.000

5. Kerupuk Ikan

4 ekor /Kg

= 40.000 ekor : 4 = 10.000 ekor

10.000 ekor x Rp. 70.000 = Rp. 700.000.000

6. Mpek – mpek

4 ekor /Kg

= 40.000 ekor : 4 = 10.000 ekor

10.000 ekor x Rp. 30.000 = Rp. 300.000.000

Dalam bidang pemasaran, Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam membantu para kelompok petani ikan dalam pemasaran produk olahan dari masing – masing kelompok. Seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang memuat Tugas dan Fungsi Seksi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan pada pasal 21 tertulis bahwa tugas dan fungsi dari seksi bidang tersebut adalah melaksanakan bimbingan teknis managerial pelaku usaha perikanan, melaksanakan pemberdayaa sosial ekonomi masyarakat perikanan, memfasilitasi kerjasama kelompok masyarakat, melaksanakan pelatihan serta

menumbuh kembangkan kelompok – kelompok pelaku usaha, melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM dan kelembagaan perikanan.

Berdasarkan survei awal melalui wawancara yang penulis lakukan pada petani ikan di Desa Koto Mesjid, masih ada sebagian petani yang belum bisa menanggulangi penyakit pada ikan budidayanya. Adapun faktor pendukung datangnya penyakit pada ikan adalah faktor cuaca. Seperti, musim kemarau, pada cuaca panas ekstrim tersebut ikan di kolam dapat mati akibat suhu udara yang terlalu panas dan dapat menimbulkan penyakit pada ikan. Cuaca dingin saat musim hujan juga dapat menjadi salah satu faktor pendukung datangnya penyakit pada ikan, dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan endapan lumpur dan sisa makanan yang berada didasar kolam naik ke permukaan dan bercampur dengan keseluruhan air kolam sehingga menyebabkan virus dan penyakit menyebar dengan luas. Faktor pendukung lainnya adalah kebersihan kolam, pertukaran air di kolam yang berasal dari sungai – sungai kecil yang berada di sekitar kolam juga menjadi faktor pendukung selanjutnya. Karena, air sungai yang mereka miliki adalah sarana sebagian Ibu – ibu disekitar sungai tersebut untuk mencuci dan aktifitas lainnya.

Melalui pemberdayaan serta pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar kepada masyarakat petani ikan dengan cara memberikan pembinaan seperti pengetahuan bagaimana cara mempersiapkan kolam sebelum pengisian benih, pengetahuan tentang bagaimana menangani penyakit pada ikan. Sedangkan pemberdayaan yang diberikan salah satunya berupa bantuan kepada

petani ikan untuk pembuatan kolam dan atau peralatan, pakan serta benih yang diberikan dari Dinas Perikanan. Akan tetapi pada realitanya masih terdapat beberapa masyarakat petani ikan yang masih minim pengetahuannya baik tentang bagaimana penanganan terhadap penyakit pada ikan dan kebersihan kolam sebelum dan sesudah pemanenan.

Berdasarkan uraian dan data-data diatas serta pengamatan penulis dilapangan terhadap Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan dirasa masih belum maksimal, yang mana masih terdapat fenomena atau gejala-gejala permasalahan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani ikan di desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar dirasa masih belum maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat petani ikan serta keterampilan akan cara penanggulangan penyakit pada ikan.
2. Pelaksanaan pemberdayaan dirasa masih belum maksimal, karena masih adanya petani ikan yang membangun atau memiliki fasilitas MCK diatas kolam pemeliharaan dan septic tank yang berjarak kurang dari 10 meter menurut ketentuan yang tertulis pada Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.02/MEN/2007.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tentang hasil perikanan di Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar, dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul dalam penulisan ini adalah **“Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani**

Ikan Di Kabupaten Kampar(Studi Kasus Di Koto Mesjid XIII Koto Kampar)”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu **“Bagaimana Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Memberdayakan Masyarakat Petani Ikan Di Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar?”**

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peran dinas perikanan kabupaten kampar dalam memberdayaan kasyarakat petani ikan di desa Koto Mesjid XIII Koto kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani ikan di desa koto mesjid XIII Koto Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu pemerintahan.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan ditemukannya hal-hal yang baru yang selama ini mungkin belum mendapat perhatian.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan asukan penelitian yang akan datang untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

1. Konsep pemerintahan dan Ilmu pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan.

Menurut Ndraha (2011 : 36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut H.A Barsz (dalam Syafiie 2011 : 9) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Pemerintah adalah orang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dalam Ndraha (2003 : 6).

Sedangkan Syafiie (2014 : 12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Fungsi pemerintahan diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik di privasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment) sebagai penyelenggara pembangunan dan melaksanakan program pemberdayaan (Ndraha, 2011 : 85).

Menurut Syafiie (2001;20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, maupun kiat serta karismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

Sedangkan menurut Ndraha (2003;5) mengataka bahwa pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhii dan melindungi kebutuhan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan

pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

2. Konsep Peranan

Peranan adalah suatu bagian perilaku yang diharapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. Ndraha (2003 : 53)

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (2001;55) peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang diberkedudukan masyarakat. Sedangkan peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Poerwadarminta (2002;73) peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Menurut Soekanto (1990) peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu pemerintahan, peranan juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Peranan juga bertujuan untuk mempermudah upaya mencapai tujuan masyarakat dengan cara menyediakan atau memberi fasilitas yang dipergunakan masyarakat untuk mengatasi masalah. Menurut Soekanto (1990) adalah sebagai berikut :

- a. Mendampingi masyarakat dalam setiap tindakan.
- b. Memberikan dukungan emosional yang diperlukan masyarakat agar masyarakat diperhatikan.
- c. Berupaya membantu masyarakat mengatasi masalah yang dihadapinya.
- d. Memberikan pelayanan mediasi jika masyarakat mengalami konflik.
- e. Memberikan pelayanan pembelan bagi masyarakat yang berbeda dalam posisi yang dirugikan.
- f. Memberikan informasi yang diperlukan masyarakat mengenai kondisi lembaga.
- g. Memberikan pelayanan konsultasi kepada masyarakat yang ingin mengungkapkan permasalahannya.
- h. Menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga.
- i. Memberikan intervensi pada sejumlah masyarakat mengenai isu, topik, yang mereka menikmati.

Menurut pengertian peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan tak dapat dipisah-pisahkan. Karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya. Tak ada peranan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Dari pengertian peranan dari Soekanto , yang mana menjelaskan bahwa dalam peranan terdapat kedudukan, peranan ada apabila ada kedudukan, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan. Jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status aspek fungsional dari kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peranan seseorang tergantung kepada kedudukannya.

Peranan adalah seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dengan masyarakat, setiap peranan bertujuan agar individu-individu yang melaksanakan peran tadi dengan orang-orang disekitarnya terhadap hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua pihak.

3. Konsep Organisasi

Sebagaimana dikemukakan Siagian (2003;6) organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok yang yang disebut bawahan.

Menurut E. Wight Bakke (dalam Kusdi. 2009;5) orgaisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiverentasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecah masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumberdaya dalam lingkungannya.

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan Siagian (2003;96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Organisasi adalah system perserikatan formal dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang tertentu (Melayu Hasibuan 2006).

Hubungan formal antara orang-orang dalam organisasi pada umumnya telah diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta hirarki yang terdapat dalam organisasi. Sebaliknya hubungan informal antara orang-orang didalam organisasi tidak diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi.

Dasar hubungan yang bersifat informal menurut Siagian (2003;96) antara lain:

1. Hubungan yang didasarkan pada personal relations
2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi
3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi
4. Kesamaan minat dalam kegiatan-kegiatan diluar organisasi

4. Konsep Manajemen

Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda.

Manajemen adalah ilmu seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto 2005;9).

Manajemen tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional seperti yang telah dikemukakan Siagian (2003;5) Manajemen adalah pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Arti manajemen sebagai ilmu dan seni didasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa seorang ilmuwan sekaligus seniman, karena disamping mengandalkan diri pada ilmu, ia juga harus mempunyai firasat, keyakinan, kreativitas, dan menguasai cara-cara penerapannya.

Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal, dengan demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pemimpin maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang terbaik mungkin kepada masyarakat seperti yang diungkapkan Johan F. Mee (dalam Hamim dan Indra muclis Adnan. 2005;16).

G.R Teri (dalam Siswanto 2003;10) mengatakan, secara esensial seorang manajer adalah seorang ilmuwan dan seniman. Ia memerlukan suatu pengetahuan yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaannya.

Apabila seorang organisasi supaya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen

merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli 2005;28) manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu digunakan adalah : ketatalaksanaan, manajemen, management dan pengurusan. Untuk menghindari penafsiran yang erbeda-beda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu manajemen mengandung tiga pengertian :

- a.) Manajemen sebagai suatu proses
- b.) Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- c.) Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mencatatkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerapkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.

Menurut Nawawi (2008;41) beliau memilah-milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah :

1. Untuk tujuan organisasi, yang bila dikaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.

2. Untur bantuan, yang bila dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi organisasi melalui kerja individual dan kerja didalam tim (team work).
3. Unsur orang lain, yang jika dikaitkan dengan pandangan baru, dapat diartikan para pekerja dan para maajer dan top manajer, namun jika para manajer dan top manajer dipandang sebagai kesatuan dan disebut eksklusif, maka orang lain adalah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai partner.

Kemudian menurut Hasibuan (1995;5) yang mengatakan bahwa manajemen adalah seni sebagai ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Darwis (2009;5) yang mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh mkaren itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Setiap fungsi manajemen sangat diperlukan untuk mengatur manajemen pada setiap organisasi hingga tercapainya tujuan akhir dari sebuah organisasi. Dari fungsi manajemen tersebut, fungsi penilaian merupakan fungsi akhir manajemen untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan.

5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya

unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu maksimal lagi bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, kerna itulah manusia juga perlu dimanajemen.

Menurut Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Kiggundu (dalam Faustino. 2003;4) manajemen sumber daya manusai adalah penembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional.

Teori model human relations dalam manajemen sumber daya manusia, atau hubungan kemanusiaan sebenarnya tidak memunculkan hal-hal baru, model ini menggabungkan dan memperluas model tradisional. Model human reations menekankan pada unsur moralitas dalam manajemen.

Tugas manajemen sumber daya manusai berkisar pada upaya mengelola unsur manusai dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas (satisfied) dan memuaskan (satisfactory) bagi organisasi. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasai (Faustino 2003;4) antara lain :

1. Rancangan organisasai
2. Staffing
3. Sistem reward
4. Manajemen performasi
5. Pengembangan pekerja dan organisasi
6. Komunikasi dan hubungan masyarakat

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan
Perencanaan (Human Resources Planning) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (organization chart).
3. Pengarahan
Pengarahan (Directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan efektif dan efisien serta dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
4. Pengendalian
Pengendalian (Controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan
Pengadaan (Procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan
Pengembangan (Development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi
Kompensasi (Compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
8. Pengintegrasian
Pengintegrasian (Integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
9. Pemeliharaan
Pemeliharaan (Maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
10. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
11. Pemberhentian
Pemberhentian (Separation) adalah putusannya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

6. Konsep Pemberdayaan

Terkait dengan tujuan pelaksanaan pembangunan adalah proses pembangunan fisik maupun non fisik.pemberdayaan selalu mengacu kepada kelompok masyarakat yang berada pada lapisan bawah, karena posisinya sering menjadi korban dinamika pembangunan. Keelompok masyarakat ini selalu identik dengan kondisi serba kekurangan dan lemah dalam mutu taraf hidup, keterampilan dan keswadayaan. Sebab kondisi ini mereka dianggap tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004:83)

Sumaryadi (2005;114) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi:

- a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran dan prestasinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.

- b. Memperkuat daya dan potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif perkembangannya.
- c. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan ke peluang-peluang.

Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan taraf pendidikan, tingkat kesehatan, akses pada modal, teknologi tempat guna, informasi lapangan kerja dan pasar dengan fasilitasnya.

Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian sebagai berikut :

- a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri dalam kemajuan dan kemandirian bersama.
- b. Diperbaiki kondisi sekitar, kehidupan kaum rentan, lemah tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil dari berbagai bidang ekonomi kearah swadainya.
- c. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

Nansy Foy (dalam Sumaryadi 2005;99) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat saran mereka di dengar untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi, kemudian dia menggambarkan 4 (empat) indikator yang menjadi unsur utama pemberdayaan yang paling berkaitan satu sama lain dengan lainnya sebagai berikut :

1. Pemberdayaan itu berfokus kepad kinerja (*performence*)
2. Kinerja yang baik berasal dari tim yang baik (*Real Teams*)

3. Pemberdayaan membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi (*Visible Leadership*)
4. Pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*Good Communication*)

Menurut Nining Mardianah dalam Wirutomo dkk (2003;192) pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (power) dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi. Pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan dalam fikiran masyarakat tentang kemampuan, anti sistem, antistruktur, dan antideterminisme.

Selanjutnya untuk memahami makna mengenai konsep pemberdayaan, menurut Tery wilson dapat digambarkan dalam tiga tahapan, yaitu :

1. Pada tingkatan politik dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa sehari-hari sebagai *mechanisme of self-held for people* (mekanisme bantuan diri bagi orang lain).
2. Pada tingkatan organisasi, pemberdayaan mempunyai daya tarik untuk mencari gagasan dalam meningkatkan motivasi kerja yang sudah usang, seperti *total quality, habitual invrovement, performance managemen, self-derected team work, internal custumers, competence managemen* dan sebagainya.
3. Pada tingkat individu, pemberdayaan mengarah pada peningkatan keterampilan, status, kepercayaan dan kemampuan diri dalam meningkatkan taraf hidupnya. (Sumaryadi 2005;97-98).

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pemberdayaan, yang sifatnya fleksibel, yaitu :

- a. Persiapan preparation.
- b. Pengembangan kontak dengan klien.
- c. Pengumpulan data dan informasi
- d. Perencanaan dan analisis
- e. Bekerja dengan kelompok komunitas
- f. Penyadaran diri dan bersama untuk perubahan yang ingin dicapai
- g. Monitoring/evaluasi
- h. Kesepakatan bersama (Wirutomo dkk, 2003;133).

Kemudian untuk melihat lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah atau swasta harus dipandang suatu pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Dimana sebagai upaya itu menurut Sunyoto Usman (2004;21) paling tidak harus memuat lima hal pokok, yaitu :

- a. Bantuan dana sebagai modal usaha
- b. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kehidupan sosial ekonomi rakyat.
- c. Penyediaan sarana untuk memperlancar hasil produksi barang dan jasa masyarakat
- d. Pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat
- e. Penguatan kelembagaan pada masyarakat.

7. Konsep Pembinaan

Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah ditentukan. Menurut Suetopo H. Dan Soemanto, W (1991;43) mendefinisikan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990;37) bahwa pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.

Kemudian menurut Santoso (2010;139) pembinaan merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Dari pengertian pembinaan tersebut dapat kita simpulkan pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang berorientasi kearah perubahan yang lebih baik. Yang diawali dengan perenanaan, engorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan.

Suatu pembinaan memiliki ciri-ciri dalam proses penerapannya, adapun ciri-ciri pembinaan menurut Suyono (2007;180) adalah sebagai berikut.

- a. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai setinggi-tingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan.

- b. Prosedur pembinaan dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai terarah.
- c. Pembinaan sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih peristiwa yang sesuai dengan anak binaan.
- d. Pembinaan diartikan sebagai usaha menata kondisi yang pantas.

Didalam pengembangan organisasi baik itu organisasi privat maupun organisasi publik perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara terus menerus, Toha (2003;182) mendefinisikan pembinaan organisasi adalah suatu yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana didalam proses organisasi dengan menggunakan ilmu perilaku.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pembinaan organisasi merupakan tanggung jawab dari pimpinan organisasi sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan organisasi melalui perencanaan dan proses yang dilaksanakan secara bertahap.

8. Konsep Pelatihan

Menurut Simamora (dalam Sofian Efendi, 2013;2) pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja.

Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pelatihan kinerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

Menurut Hani Handoko (dalam Sofian Handoko, 2003;2) latihan (training) dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin.

Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumberdaya manusia organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. (dalam Sofian Efendi 2003;3).

Menurut Gomes (dalam Sofian Efendi, 2003;3) mengemukakan pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Menurut istilahnya pelatihan sering disamakan dengan istilah pengembangan, pemberdayaan kalau pelatihan langsung terkait dengan performansi kerja pada pekerjaan yang sekarang, sedangkan pengembangan tidaklah harus, pengembangan mempunyai scope yang lebih luas dibanding dengan pelatihan.

Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan, menurut Simomara (dalam Sofian Efendi, 2003;3) ada lima jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan:

1. Pelatihan keahlian

Merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana : kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli, kriteria penilaian efektifitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahapan penilaian.

2. Pelatihan ulang

Adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah.

3. Pelatihan lintas fungsional

Melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja lainnya selain dari pekerjaan yang ditugaskan.

4. Pelatihan tim

Merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja.

5. Pelatihan kreativitas

Berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari.. maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebasmungkin yang berdasarkan pada penelitian rasional.

9. Konsep pengawasan

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan."

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:44) menyatakan Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Definisi Lain diungkapkan oleh Kusnadi, dkk sebagai berikut:

Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.

Kusnadi, dkk (1999:265). Fathoni mendefinisikan bahwa: Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Fathoni (2006 : 30).

Sedangkan Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sofyan menyatakan definisi pengawasan adalah sebagai berikut:

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, Perintah yang dikeluarkan dan prinsip dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Sofyan(2004:12).

Lebih lanjut menurut Kadarman menyat akan definisi pengawasan adalah sebagai berikut:

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan .Kadarman (2001:15 9).

Dari Beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak pimpinan/atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

B. Kerangka Pikir

Dari penjelasan latar belakang masalah dan juga studi kepustakaan, penulis selanjutnya merumuskan kerangka pikir penelitian yang berkaitan dengan peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam memberdayakan masyarakat petani ikan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I.1: Kerangka pikir Tentang Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Koto mesjid XIII Koto Kampar).



C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang untuk menganalisis informasi dan data, maka penulis akan memberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan dan disesuaikan dengan konsep yang ada di daerah penelitian serta masalah yang akan diteliti dan bertujuan untuk memudahkan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.
- b. peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu pemerintahan, peranan juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- c. Pemberdayaan suatu upaya meningkatkan harkat atau taraf hidup lapisan masyarakat dan pribadi manusia.
- d. Penyadaran adalah memahami atau mengetahui suatu tingkat pengamatan atau pemikiran yang terkendali.
- e. Penyuluhan adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

- f. Penungkatan kemampuan adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas.

D. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. I : Operasional Variabel Penelitian tentang Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam Memperdayakan masyarakat petani ikan di Desa Koto mesjid Kecamatan XIII Koto Mesjid.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Peranan adalah suatu bagian perilaku yang diharapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. Ndraha (2003 : 53)	Peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan petani ikan.	1. Penyadaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan perilaku masyarakat sehingga merasa membutuhkan pengetahuan lebih b. Memberikan wawasan untuk menambah keterampilan masyarakat c. peduli akan kapasitas diri dan guna dari pemberian pemberdayaan 	Ordinal
		2. penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki wawasan pengetahuan untuk melihat peluang yang belum terlaksana dengan baik 	Ordinal

1	2	3	4	5
		<p>3. Peningkatan kemampuan</p>	<p>b. memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan kembali</p> <p>c. mengarahkan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan potensi yang ada</p> <p>a. memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah</p> <p>b. mengarahkan masyarakat agar dapat mengasah kemampuan intelektual individu maupun kelompok</p> <p>c. menciptakan kemampuan inovatif masyarakat agar tanggap dalam menyelesaikan masalah dan peningkatan keterampilan</p>	Ordinal

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun, 2018

E. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian tentang Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan di desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar. teknik pengukuran atau skala yang digunakan untuk setiap indikator dan variable dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) katagori, yaitu :

- Baik : Apabila indikator yang terdiri dari Penyadaran, Penyuluhan dan Peningkatan kemampuan berada pada skor 67-100%.
- Cukup Baik : Apabila indikator yang terdiri dari Penyadaran, Penyuluhan dan Peningkatan kemampuan berada pada total skor 34-66%.
- Kurang Baik : Apabila indikator yang terdiri dari Penyadaran, Penyuluhan dan Peningkatan kemampuan berada pada total skor 1-33%.

Sedangkan untuk pengukuran indikator-indikator variabel yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyadaran

- Baik : Apabila semua indikator variabel yang terdiri dari 3 item penilaian dapat terlaksana dengan baik atau jawaban responden berada pada skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator variabel dapat terlaksana mencakup 2 dari 3 item penelitian atau jawaban responden berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator variabel dapat terlaksana mencakup 1 dari 3 item penelitian tidak terlaksana atau jawaban responden berada pada total skor 1-33%.

2. Penyuluhan

Baik : Apabila semua indikator variabel yang terdiri dari 3 item penilaian dapat terlaksana dengan baik atau jawaban responden berada pada skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator variabel dapat terlaksana mencakup 2 dari 3 item penelitian atau jawaban responden berada pada total skor 34-66%.

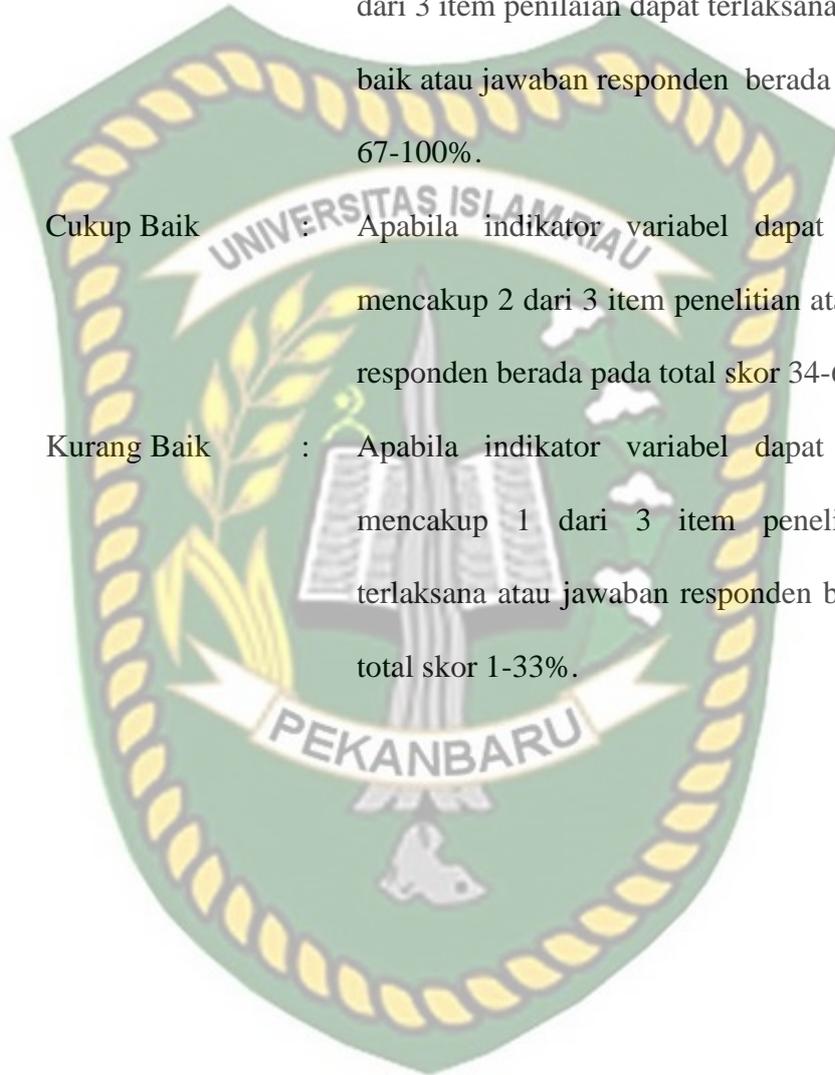
Kurang Baik : Apabila indikator variabel dapat terlaksana mencakup 1 dari 3 item penelitian tidak terlaksana atau jawaban responden berada pada total skor 1-33%.

3. Peningkatan Kemampuan

Baik : Apabila semua indikator variabel yang terdiri dari 3 item penilaian dapat terlaksana dengan baik atau jawaban responden berada pada skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator variabel dapat terlaksana mencakup 2 dari 3 item penelitian atau jawaban responden berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator variabel dapat terlaksana mencakup 1 dari 3 item penelitian tidak terlaksana atau jawaban responden berada pada total skor 1-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Mueller dalam (H. Bandin Nur Tanjung dan H. Ardial 2009;39) mengatakan metodologi adalah suatu sistematis mengenai prosedur dan teknis yang di hubungkn dengan sesuatu. Dalam menguraikan metode penelitian, pertama-tama harus disebut secara eksplisit tipe penelitian.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe deskriptif survey. Dengan metode penelitian kuantitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan, sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka. Berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat petani ikan oleh Dinas Perikanan.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan pada kelompok masyarakat petani ikan di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Perikanan merupakan salah satu sub sektor strategis yang memberikan sumbangan devisa relatif cukup besar bagi negara pada umumnya dan khususnya Kabupaten Kampar sebagai kawasan sentra industri perikanan air tawar di Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.99/11/2000, tanggal 28 Februari

2000. Sebagai daerah maritim hasil ikan Indonesia memang menjanjikan clan mengalami perkembangan setiap tahunnya, sehingga oleh pemerintah sektor perikanan dianggap sebagai sektor andalan disamping sektor-sektor lainnya seperti perkebunan, pertanian dan kehutanan.

Pengembangan sub sektor perikanan diarahkan pada perkembangan dalam proses produksi untuk menghasilkan benih ikan yang produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh faktor-faktor produksi yang baik untuk memperoleh produksi benih ikan bermutu.

Adapun dasar pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitian adalah pertama, Kecamatan XIII Koto Kampar salah satu kecamatan penghasil ikan dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Kampar dalam jenis Ikan Patin. Kedua, Desa Koto Mesjid adalah Desa yang memiliki jumlah kelompok petani ikan terbanyak dari Kabupaten Kampar yaitu berjumlah 25 Kelompok Petani Ikan. Dengan alasan Dinas ini yang berperan dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani ikan pada usaha petani ikan. Alasan lain adalah Kecamatan XIII Koto Kampar adalah lokasi pembudidayaan dengan jumlah penghasilan panen terbesar di Kabupaten Kampar sedangkan Desa Koto Mesjid adalah Desa pembudidaya dengan jumlah kelompok terbanyak di XIII Koto Kampar.

C. Populasi dan sampel

Populasi adalah unit analisis atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

jumlahnya. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini akan diambil dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, pegawai Bidang Sumberdaya Perikanan Dan kelembagaan khususnya pada bagian seksi Sumberdaya Manusia Dan Kelembagaan Usaha Perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan Masyarakat Petani Ikan serta Kepala Desa di Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III. 1: jumlah populasi dan sampel penelitian.

No	Populasi	Jumlah		Persentase (%)
		Populasi (Orang/Kelompok)	Sampel (Orang/Kelompok)	
1.	Kelompok Masyarakat Petani Ikan Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar	25 Orang	25 Orang	100%
Jumlah		25 Orang/Kelompok	25 Orang/Kelompok	-

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

D. Teknik penarikan sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara “sampel total atau

sensus.” Hal ini disebabkan jumlah populasi relatif kecil sehingga mudah dijangkau, maka peneliti menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel.

Menurut Usman dan Akbar (2011:42) penelitian menggunakan seluruh populasi anggota populasinya disebut sampel total atau sensus. Penggunaan ini berlaku jika semua anggota populasi yang dijadikan sampel. Batas diatas dapat berlaku di interpretasikan, bahwa sampel total atau sensus dapat digunakan bila anggota populasinya relatif kecil.

E. Jenis dan sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya :

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan penyebaran angket dengan responden.

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang telah didapatkan.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuisisioner

Yaitu mengajukan daftar pertanyaan tertulis yang dilengkapi alternatif jawaban kepada responden yang telah ditetapkan dengan alasan untuk

memperoleh data dari responden mengenai peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan alasan untuk mengetahui secara tetap situasi dan kondisi dari lokasi penelitian yaitu pada Dinas Perikanan Kabupaten Kampar khususnya pada seksi Sumberdaya Manusia Dan Kelembagaan Usaha Perikanan yang melaksanakan langsung peran pemberdayaan masyarakat petani ikan.

3. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada populasi yang sudah terpilih menjadi responden peneliti, dilakukan dengan dua cara yaitu terstruktur atau bebas dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat terhadap sampel peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam memberdayakan Masyarakat Petani Ikan.

4. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambar tentang keadaan lokasi penelitian.

Pada penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu kuisisioner pada Masyarakat Petani Ikan di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar. Sedangkan pada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar,

pegawai Bidang Sumberdaya Perikanan Dan kelembagaan khususnya pada bagian seksi Sumberdaya Manusia Dan Kelembagaan Usaha Perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan Kepala Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

Pada teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, penulis mendapatkan gambaran lapangan pada lokasi penelitian ini, yaitu di Dinas perikanan Kabupaten Kampar saat melakukan wawancara pada pihak terkait, di Desa Koto Mesjid pada saat menyebarkan kuisisioner dan meninjau langsung kolam – kolam yang dimiliki petani ikan tersebut, di Kantor Desa Koto Mesjid serta Kantor Camat XIII Koto Kampar tepatnya di Batu Besurat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder serta bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan, dan kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dari keseluruhan data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai data tabel yang ada, untuk dapat selanjutnya menarik kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 :Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar)

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■	■	■	■								
3	Perbaikan UP					■	■	■	■								
4	Riset									■	■	■	■				
5	Penelitian Lapangan									■	■	■	■				
6	Penelitian dan Analisis Data													■	■	■	■
7	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi																
8	Ujian Skripsi																
9	Revisi dan Pengesahan Skripsi																
10	Penyerahan Skripsi																

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Desa Koto Mesjid

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah Di Provinsi Riau. Awal berdirinya dan dibentuk pemerintahan Kabupaten Kampar untuk pertama kalinya tahun 1945 berdasarkan keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah nomor:10/GM/TE49 tanggal 9 November 1949, merupakan kabupaten wilayahnya terluas di provinsi Riau dengan memiliki 4 kewedananya yakni kewedanan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan Ibukota Kabupaten berkedudukan di Pekanbaru. Namun berdasarkan undang – undang nomor 12 tahun 1956 kedudukan ibukota Kabupaten tersebut di pindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana pada tanggal 6 juni 1967.

Sejalan dengan perkembangan iklim politik didalam negeri maka berdasarkan undang – undang nomor 53 tahun 1999 wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 kabupaten yakni Kabupaten Kampar Sendiri (Induk), Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan dan sekarang ini ditambah dengan Rokan Hilir.

Kabupaten Kampar terletak pada posisi antara $10^{\circ}20'$ lintang utara - $101^{\circ}40'$ bujur timur dengan batas wilayah adalah :

- a. Sebelah utara dengan kota Pekanbaru dan kabupaten Siak
- b. Sebelah selatan dengan kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah barat dengan kabupaten Rokan Hulu dan provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah timur dengan kabupaten Pelalawan dan kabupaten Siak

Desa Koto Masjid adalah nama suatu desa yang terletak di wilayah kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Desa Koto Masjid merupakan Desa Pemekaran dari Desa Pulau Gadang pada tahun 1999 sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 247 Tahun 1999 yang pada saat itu dengan jumlah 343 kepala keluarga (KK) dan jumlah penduduk 1.239 jiwa. Nama dari Koto Masjid diambil dari nama sebuah dusun atau kampung pertama semasa Koto Masjid Masih bergabung dengan Desa Pulau Gadang (sebelum pemekaran desa). Sekarang, wilayah lokasi dari dusun tersebut berada di genangan waduk PLTA Koto Panjang.

Desa Koto Masjid terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara dengan Desa Batu Langka, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah timur dengan Desa Silam, Kecamatan Bangkinang Barat
- Sebelah selatan dengan Merangin, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah barat dengan Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Luas wilayah Desa Koto Masjid adalah 425,5 ha. Berupa daratan yang bertopografi perbukitan. Daratan dimanfaatkan sebagai lahan perikanan (kolam

darat). Iklim desa Koto Masjid, sebagaimana desa - desa lain yang ada di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap usaha perikanan yang ada di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Kondisi lingkungan Desa Koto Masjid merupakan wilayah yang berada di pingiran waduk PLTA Koto Panjang. Hal ini menjadikan Desa Koto Masjid selain sebagai pusat pengembangan perikanan kolam darat, juga berpotensi dalam pengembangan keramba jaring apung (KJA) di waduk PLTA Koto Panjang. Perkembangan bidang perikanan Koto Masjid juga tidak terlepas dari dukungan sumber air yang sangat memadai. Pada awalnya Koto Masjid Tidak memiliki sumber airdan tergolong daerah yang kurang baik untuk budidaya ikan. Namun, sejak ditemukannya sumber mata air berupa air bawah tanah yang sangat melimpah, Desa Koto Masjid berubah menjadi salah satu kawasan budidaya air tawar yang cukup dikenal dengan pemanfaatan air melalui sumur bor.

B. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

Dinas Perikanan Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang perikanan. (Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016).

1. Klasifikasi Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Berdasarkan Usia

Dari hasil penellitian diperoleh identitas pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang digunakan berdasarkan usia, seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1: Identitas Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar berdasarkan usia.

No	Tingkat Usia	Frekuensi
1.	31 – 40	9
2.	41 – 50	27
3.	51 – 60	13
Jumlah		49

Sumber: Hasil penelitian Lapangan, 2018.

Pada tabel VI.1 dari 49 orang Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang diketahui bahwa kelompok usia terbanyak adalah usia 41 – 50 tahun yaitu sebanyak 27 orang. Kemudian diikuti kelompok usia 51 – 60 tahun sebanyak 13 orang. Sedangkan kelompok usia terkecil adalah 31 – 40 tahun sebanyak 9 orang.

2. Klasifikasi Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Kelamin.

Dari hasil penellitian diperoleh identitas pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang digunakan berdasarkan jenis kelamin seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 : Identitas Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki – laki	31
2	Perempuan	18
Jumlah		49

Sumber: Hasil penelitian Lapangan, 2018.

Pada tabel IV.2 dari 49 orang Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang diketahui bahwa pegawai berjenis kelamin Laki – laki berjumlah 31 orang. Kemudian diikuti pegawai berjenis kelamin Perempuan berjumlah 18 orang.

3. Klasifikasi pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Dari hasil penelitian diperoleh identitas pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang digunakan berdasarkan Tingkat Pendidikan seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 : Identitas Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	SLTA	16
2	Strata Satu (S1)	28
3	Strata Dua (S2)	5
Jumlah		49

Sumber: Hasil penelitian Lapangan, 2018.

Pada tabel IV.3 dari 49 orang Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang diketahui bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah Strata

Satu (S1) berjumlah 28 Orang. Pegawai dengan tingkat pendidikan berikutnya adalah SLTA berjumlah 16 orang. Kemudian diikuti pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 5 orang.

C. Uraian Tugas Dinas Perikanan

Berdasarkan peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 dijelaskan tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016.

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan menurut Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016 yaitu :

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Terdiri :

1. Kepala Dinas

Sekretariat Terdiri Dari :

- a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program Dan Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan Dan Aset

2. Bidang Perbenihan Perikanan Terdiri Dari :

- a. Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi Benih
- b. Seksi Pembenihan Ikan

3. Bidang Budidaya Perikanan Terdiri Dari :

- a. Seksi Produksi Dan Kesehatan Ikan

- b. Seksi Pakan Ikan
- 4. Bidang Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan terdiri Dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Dan Perizinan
 - b. Seksi Bina Mutu, Promosi Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 5. Bidang Sumber Daya Perikanan Dan Kelembagaan Terdiri Dari :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap Dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Usaha Perikanan.

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan Kabupaten Kampar Memuat Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas Perikanan pada pasal 5 yaitu :

- (1) Dinas perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, kewenangan dibidang perikanan
 - b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten
 - c. Melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis dibidang perikanan

- d. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang perikanan
- e. Melakukan pengelolaan, pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang perikanan
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdaya perikanan
- g. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan monitoring kegiatan perikanan tangkap
- h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi dinas
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- k. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai
- l. Pengelolaan UPT Dinas

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Memuat Tugas Dan Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan Dan Kelembagaan pada pasal 19 yaitu :

- (1) Bidang sumber daya perikanan dan kelembagaan di pimpin oleh seorang Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan sumberdaya perikanan dan perlindungan,

pengendalian penyakit, kesehatan dan karantina ikan, pengembangan perikanan tangkap dan melaksanakan kebijakan penguatan kelembagaan perikanan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud di ayat (1) adalah :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang sumberdaya perikanan dan kelembagaan
- b. Perumusan kebijakan teknis perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, dan karantina ikan serta standarisasi dan pengawasan mutu
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, kesehatan dan karantina ikan serta standarisasi dan pengawasan mutu
- d. Penyelenggaraan perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, dan karantina ikan serta standarisasi dan pengawasan mutu
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, dan karantina ikan serta penguatan kelembagaan perikanan
- f. Penyusunan program, perumusan, pengidentifikasi dan pengelolaan para nelayan dan perariran umum daratan (PUD)
- g. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengayaan *stuck* ikan melalui *restocking*, pemulihan dan domestifikasi jenis ikan lokal
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

- i. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai
- j. Pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Memuat Tugas Dan Fungsi Seksi Bidang Sumberdaya Manusia Dan Kelembagaan Perikanan pada pasal 21 yaitu :

- (1) Seksi sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan dan melaksanakan kebijakan teknis penguatan kelembagaan perikanan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis managerial pelaku usaha perikanan
 - c. Melaksanakan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat perikanan
 - d. Memfasilitasi kerja sama kelompok masyarakat perikanan dengan pihak ketiga (BUMN / BUMD dan pengusaha perikanan)
 - e. Melaksanakan pelatihan terhadap tenaga teknis perikanan dan pelaku usaha perikanan
 - f. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan
 - g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan SDM dan kelembagaan perikanan

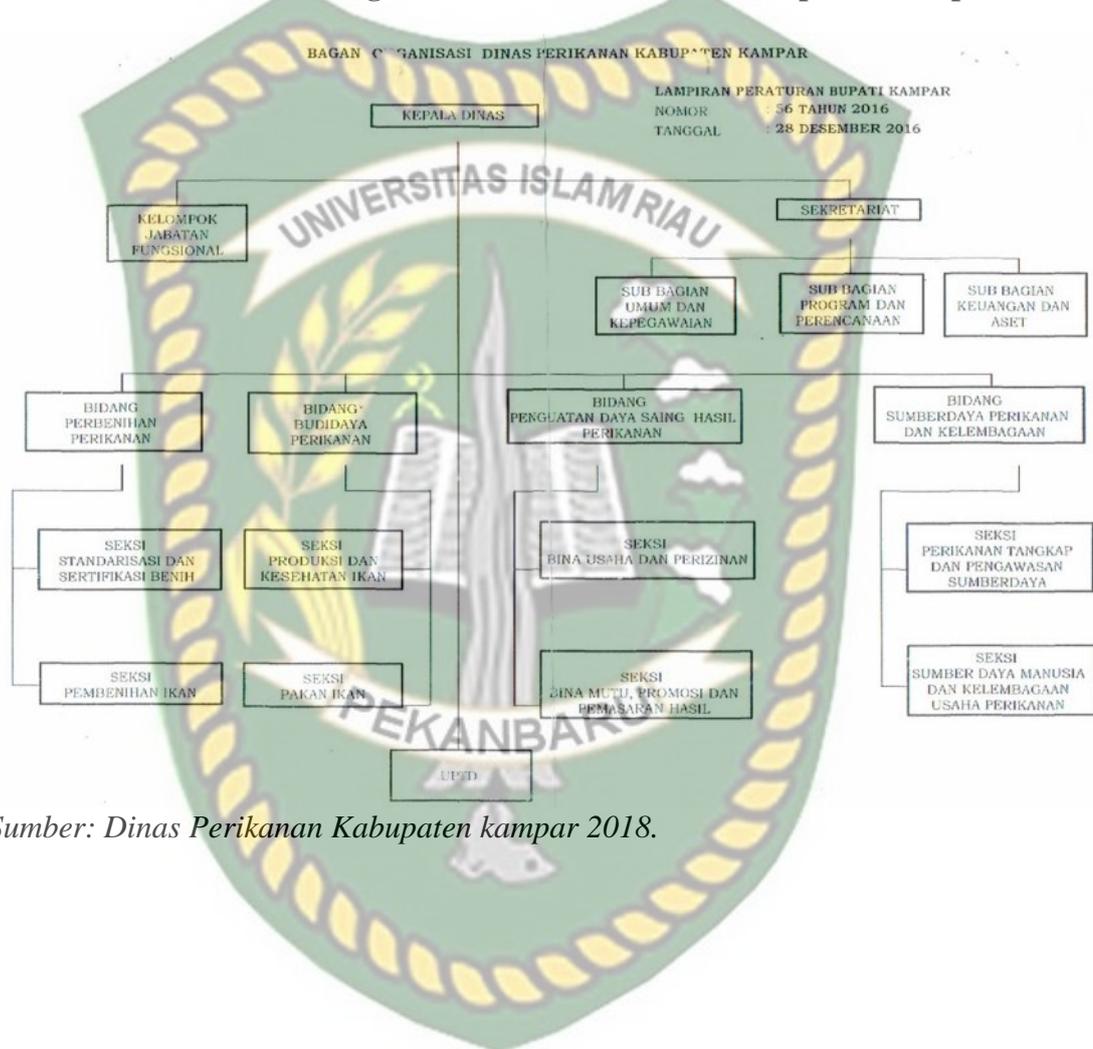
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kelembagaan perikanan
- i. Melaksanakan *monitoring* evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan perikanan
- j. Melaksanakan penilaian dan pengukuhan kelas kelompok
- k. Menyelenggarakan pertemuan rutin bulanan dan arahan bersama tenaga penyuluh perikanan
- l. Melakukan lomba kelompok utama dan pelaku usaha bidang perikanan ditingkat Kabupaten
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- n. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 diatas, ditegaskan bahwa salah satu tugas dari Seksi Bidang Sumberdaya Manusia Dan Kelembagaan Perikanan adalah melaksanakan kebijakan teknis penguatan kelembagaan perikanan yaitu kelompok-kelompok dari masyarakat petani ikan. Bidang ini sangat strategis mengingat bahwa Kampar adalah penyumbang produksi ikan terbesar di Riau terutama di Desa Koto Masjid yang merupakan lokasi yang paling banyak memiliki kelompok petani ikan.

Berikut gambar struktur organisasi dari Dinas Perikanan Kabupaten

Kampar :

Gambar VI.1 : Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten kampar 2018.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis. Responden tersebut terdiri dari Kepala Dinas, kepala bidang beserta seksi sumberdaya manusia dan kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar, dan masyarakat pentai ikan di Desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar. Secara keseluruhan jumlah responden yang digunakan sebanyak 30 orang responden.

1. Identitas responden berdasarkan umur

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan umur, seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Tingkat umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	30 – 40	8	32
2	40 – 50	15	60
3	50 – 60	2	8
Jumlah		25	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2018.

Pada tabel V.1 dari 25 responden yang digunakan diketahui bahwa responden yang terbanyak adalah berumur 40 – 50 tahun yaitu sebanyak 15 responden atau 60%. Kemudian diikuti responden yang berumur 30 – 40 tahun sebanyak 8

responden atau 32%, sedangkan responden terkecil adalah yang berumur 50 – 60 tahun adalah sebanyak 2 responden atau 8%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berfikir, sehingga dianggap mampu memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan Tingkat Pendidikan, seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	Presentasi (%)
1	SLTP	6	24
2	SLTA	14	56
3	Strata Satu (S1)	5	20
Jumlah		25	100%

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2018.

Pada tabel V.2 dari 25 responden yang digunakan diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan yang terbanyak adalah pendidikan tingkat SLTA yaitu sebanyak 14 responden atau 56%. Kemudian diikuti responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 6 responden atau 24%, sedangkan responden terkecil adalah berasal dari tingkat pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 5 responden atau 20%.

Berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang cukup berkompeten untuk digunakan dalam memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran “kemauan” dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektor maupun masyarakat dan tokoh masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sangat vital, karena masyarakat yang menjadi pemeran utamanya, namun peran dari pihak pemerintah atau instansi yang bertugas memberikan pemberdayaan tersebut juga tidak bisa dihilangkan. Dalam pemberdayaan masyarakat, petugas atau instansi tersebut juga memiliki peran penting. Yaitu memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan – kegiatan maupun program – program pemberdayaan masyarakat meliputi pertemuan dan pengorganisasian masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan agar

masyarakat mau berkontribusi terhadap program tersebut. Melakukan pelatihan – pelatihan yang bersifat vocational. Jenis – jenis pemberdayaan masyarakat yang diberikan diantaranya adalah pemberian pengetahuan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam rangka upaya meningkatkan kualitas masyarakat atau kelompok, pemberian bantuan seperti peralatan yang dibutuhkan, pakan serta pemberian bibit.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Peran pemerintah dalam memberikan kesejahteraan merupakan tugas utama. Untuk itu sudah selayaknya anggaran negara di alokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai model pemberdayaan masyarakat, tidak luput dari peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah melalui Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen seperti:

PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) PNPM adalah program nasional Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan

masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Pendum PNPM Mandiri, 2007).

Berikut akan penulis paparkan hasil penelitian tentang peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan :

a. Penyadaran

Dalam proses penyadaran, pada tahap ini implementasi pelatihan yang diberikan seperti memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat masyarakat mengerti bahwa mereka perlu “membangun” diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri bukan dari luar. Jadi, pada intinya adalah penyadaran mereka yang diberdayakan untuk membangun kesadaran diri bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk membangun “*capitally self*” masing – masing personal.

Penyadaran berlangsung dalam proses pengenalan diri akan potensi diri dan lingkungan sebagai kekuatan yang bisa digerakkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam kontek sosio-budaya dan struktur sosial. Penyadaran akan kemampuan diri, sumberdaya yang mereka miliki, peluang baru yang bersumber dari dalam dan luar komunitas untuk memperbaiki kondisi, dan arti solidaritas antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan merupakan misi pendampingan yang utama.



Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sebuah konsep namun pemberdayaan juga memberi ruang kepada pengembangan kemampuan dan kapasitas manusia yang beragamdengan saling melengkapi satu sama lain.

Dnas Perikanan Kabupatn Kampar melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberian pembinaan dan proses penyuluhan dalam kemajuan industri perikanan yang mereka tekuni.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang peran dinas perikanan kabupaten kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Distribusi tanggapan responden penelitian tentang Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembentukan perilaku masyarakat sehingga merasa membutuhkan pengetahuan lebih	15 (60%)	8 (32%)	2 (8%)	25 (100%)
2	Memberikan wawasan untuk menambah keterampilan masyarakat	22 (88%)	2 (8%)	1 (4%)	25 (100%)
3	Peduli akan kapasitas diri dan guna dari pemberian pemberdayaan	10 (40%)	10 (40%)	5 (20%)	25 (100%)
Jumlah		47	20	8	75

1	2	3	4	5
Rata – rata	16	6	3	25
Persentase	64%	24%	12%	100%

Sumber: hasil penelitian lapangan, 2018.

Pada tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang “Pembentukan perilaku masyarakat sehingga merasa membutuhkan pengetahuan lebih”. Bahwa responden menjawab Baik sebanyak 15 orang atau 60%, kemudian Cukup Baik sebanyak 8 orang atau 32% dan Kurang Baik sebanyak 2 orang atau 8%. Jadi rata - rata responden menjawab Baik atas “Pembentukan perilaku masyarakat sehingga merasa membutuhkan pengetahuan lebih”, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan telah terlaksana dengan baik.

Kemudian jawaban responden tentang “Memberikan wawasan untuk menambah keterampilan masyarakat”. Responden yang menjawab Baik sebanyak 22 orang atau 88%, kemudian Cukup Baik sebanyak 2 atau 8% dan Kurang Baik sebanyak 1 orang atau 4%. Jadi rata - rata responden menjawab Baik atas “Memberikan wawasan untuk menambah keterampilan masyarakat”, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah melaksanakan pemberian wawasan dan keterampilan dengan sangat baik.

Dan jawaban responden tentang “Peduli akan kapasitas diri dan guna dari pemberian pemberdayaan”. Responden yang menjawab Baik sebanyak 10 orang atau 40%, kemudian Cukup Baik sebanyak 10 orang atau 40% dan Kurang Baik sebanyak 5 orang atau 20%. Jadi rata - rata responden menjawab Baik atas “Peduli akan kapasitas diri dan guna dari pemberian pemberdayaan”, hal ini menunjukkan

bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah melaksanakan pemberdayaan dengan baik.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Ir. Usman Amin yang diwakili oleh Sekretaris yaitu Bapak Zulfahmi, S.Pi, M.Si. Menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan telah hampir terlaksana, kendala yang dihadapi seperti ada beberapa masyarakat yang kurang faham bagaimana cara budidaya ikan dengan baik, contohnya ada pembudidaya yang setelah diberikan pelatihan, pengetahuan atau pengajaran tentang bagaimana me-manage hasil panen yang tinggi. Dan juga ada kelalaian dalam penebaran ikan yang tinggi atau jumlah yang berlebih itu jelas tidak sesuai dengan aturan budidaya ikan yang baik.”

Kemudian hasil wawancara dengan kepala seksi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar Nelzudi, SP menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan pada masyarakat pembudidaya ikan sudah terlaksana, seperti telah diberikan bantuan pakan, bibit, alat pakan, uang atau modal yang langsung kerekening para pembudidaya itu sendiri. Program pemberdayaan ini telah terlaksana karena sudah tersusun dalam program program tiap tahunnya dan menempatkan penyuluh ditiap daerah yang mendapatkan pemberdayaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.”

Hasil Wawancara dengan Seksi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar Bapak Gazali, R. S.PKP, menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan yang diberikan itu beragam tergantung kebutuhan dan potensi yang dimiliki tiap kelompok atau daerah. Seperti bantuan dana langsung ke rekening kelompok, program bantuan pakan, bibit, juga alat pakan. Untuk menjangkau itu semua kita menempatkan penyuluh di tiap lokasi yang memiliki berpotensi seperti budidaya maka kami meletakkan penyuluh yang faham di bidang budidaya, begitu juga dengan kelompok penangkapan, kami meletakkan penyuluh yang merupakan sarjana atau lulusan dibidang tersebut, sama halnya dengan kelompok pengolahan. Kami menempatkan penyuluh sesuai dengan potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri.”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan kepala Desa Koto Mesjid Bapak Arjunalis, menyatakan Bahwa :

“Boleh dikatakan berjalan, telah terlaksana atau terjalin kerjasama antara kita dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.”

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban responden dalam bentuk tabel frekuensi dan juga didukung oleh hasil wawancara dengan pimpinan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar, dan Seksi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar

serta Kepala Desa Koto Masjid dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas yang dinilai dari “Penyadaran” dapat disimpulkan cukup baik.

b. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Disebutkan pula bahwa penyuluhan yaitu suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

Secara sistematis, penyuluhan dapat didefinisikan sebagai proses yang membantu menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan kedepan, membantu petani menyadari terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut. Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani. Membantu petani memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkannya sehingga mereka mempunyai berbagai alternatif tindakan. Membantu petani memutuskan pilihan yang tepat menurut pendapat mereka sudah optimal, meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihannya. Membantu petani untuk mengevaluasi dalam

meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan. Pelaku utama dalam kegiatan penyuluhan adalah seorang penyuluh atau juga sering disebut penyuluh pertanian lapangan (PPL). Penyuluh pertanian pada dasarnya adalah aparat atau agen yang membangun pertanian, pendidik/penasehat yang mengabdikan untuk kepentingan para petani beserta keluarganya dengan memberikan motivasi, bimbingan dan mendorong para petani mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusaha tani yang lebih menguntungkan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia.

Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan harus sesuai dengan program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian dimaksudkan untuk memberikan arahan, pedoman, dan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan pertanian. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melakukan penyuluhan setiap tiga bulan sekali, tergantung pada anggaran yang diberikan dan jumlah kelompok petani ikan yang akan diberdayakan.

Jawaban responden tentang penyuluhan dilihat dari indikator penyuluhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4 : Distribusi tanggapan responden penelitian tentang Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memiliki wawasan pengetahuan untuk melihat peluang yang belum terlaksana dengan baik	10 (40%)	6 (24%)	9 (36%)	25

1	2	3	4	5	6
2	Memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan kembali	15 (60%)	8 (32%)	2 (8%)	25
3	Mengarahkan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan potensi yang ada	10 (40%)	15 (60%)	0 (0%)	25
Jumlah		35	29	11	75
Rata – rata		12	9	4	25
persentase		48	36	16	100

Sumber: hasil penelitian lapangan, 2018.

Pada tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang “Memiliki wawasan pengetahuan untuk melihat peluang yang belum terlaksana dengan baik”. Bahwa responden menjawab Baik sebanyak 10 orang atau 40%, kemudian Cukup Baik sebanyak 6 orang atau 24% dan Kurang Baik sebanyak 9 orang atau 36%. Jadi rata - rata responden menjawab Baik atas “Memiliki wawasan pengetahuan untuk melihat peluang yang belum terlaksana dengan baik”, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan telah terlaksana dengan baik.

Kemudian jawaban responden tentang “Memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan kembali”. Responden yang menjawab Baik sebanyak 15 orang atau 60%, kemudian Cukup Baik sebanyak 8 atau 32% dan Kurang Baik sebanyak 2 orang atau 8%. Jadi rata - rata responden menjawab Baik atas “Memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan kembali”, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah melaksanakan pemberian wawasan dan keterampilan dengan sangat baik.

Dan jawaban responden tentang “Mengarahkan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan potensi yang ada”. Responden yang menjawab Baik sebanyak 10 orang atau 40%, kemudian Cukup Baik sebanyak 15 orang atau 60% dan Kurang Baik tidak ada responden yang memberikan jawaban. Jadi rata - rata responden menjawab Baik atas “Mengarahkan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan potensi yang ada”, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah melaksanakan pemberdayaan dengan baik.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Ir. Usman Amin yang diwakili oleh Sekretaris yaitu Bapak Zulfahmi, S.Pi, M.Si. Menyatakan bahwa :

“Dengan adanya pemberdayaan ini dapat meningkatkan perekonomian daerah juga rumah tangga para kelompok petani ikan, karena dengan adanya pemberdayaan, pembinaan seperti diberikannya suatu pembelajaran, penyuluhan dan diklat. Selain itu dapat meningkatkan disiplin, ilmu dan bagaimana cara berbudidaya ikan dengan baik hingga mendapatkan hasil yang baik maka akan meningkatkan perekonomian daerah terlebih rumah tangga petani ikan itu sendiri.”

Kemudian hasil wawancara dengan kepala seksi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar Nelzudi, SP menyatakan bahwa :

“Kalau pemberdayaan jelas setiap tahun secara ekonomis berkembang, kenapa dikatakan demikian, yang dinamakan pemberdayaan itu sifatnya bergerak. Seperti yang awalnya tidak mau dan setelah diberi pemberdayaan menjadi mau, seperti yang awalnya mereka tidak mampu dan setelah mendapat pemberdayaan mereka pun menjadi mampu. Dari pergerakan dari tidak mau menjadi mau dan yang dari tidak mampu menjadi mampu itu akan menimbulkan ekonomi yang baik pula.”

Hasil Wawancara dengan Seksi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar Bapak Gazali, R. S.PKP, menyatakan bahwa :

“Kita berupaya melakukan pelayanan yang baik pada pemberian pemberdayaan agar program ini berjalan dengan baik, juga pelaku usaha itu merasa nyaman dalam pembangunan perikanan, merasa puas dengan hasil dari pemberdayaan yang diberikan.”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan kepala Desa Koto Masjid Bapak Arjunalis, menyatakan Bahwa :

“Menjabatani masyarakat kepada Dinas Perikanan, seperti menyuarakan keinginan masyarakat tentang program pemberdayaan yang sedang dilaksanakan. Memberitahu apa saja kekurangan atau ada beberapa kelompok yang tidak dapat bantuan dari program tersebut.”

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban responden dalam bentuk tabel frekuensi dan juga didukung oleh hasil wawancara

dengan pimpinan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar, dan Seksi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar serta Kepala Desa Koto Mesjid dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas yang dinilai dari “Penyuluhan” dapat disimpulkan cukup baik.

c. Peningkatan Kemampuan

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat dapat juga berupa pangkat, taraf dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan, secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas. Peningkatan juga dapat diartikan penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti dapat atau bisa. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Secara umum kemampuan ialah kecakapan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang.

Jawaban responden tentang penyuluhan dilihat dari indikator penyuluhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Distribusi tanggapan responden penelitian tentang Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah	20 (80%)	5 (20%)	0 (0%)	25
2	Mengarahkan masyarakat agar dapat mengasah kemampuan intelektual individu maupun kelompok	19 (76%)	4 (16%)	2 (8%)	25
3	Menciptakan kemampuan inovatif masyarakat agar tanggap dalam menyelesaikan masalah dan peningkatan keterampilan	22 (88%)	2 (8%)	1 (4%)	25
Jumlah		61	11	3	75
Rata – rata		20	4	1	25
persentase		80	16	4	100

Sumber: hasil penelitian lapangan, 2018.

Pada tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang “Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah”. Bahwa responden menjawab Baik sebanyak 20 orang atau 80%, kemudian Cukup Baik sebanyak 5 orang atau 20% dan Kurang Baik tidak ada responden yang memberikan jawaban. Jadi rata - rata responden menjawab Baik atas “Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah”, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam pemberian kemampuan dalam memecahkan masalah pada masyarakat petani ikan telah terlaksana dengan baik.

Kemudian jawaban responden tentang “Mengarahkan masyarakat agar dapat mengasah kemampuan intelektual individu maupun kelompok”. Responden yang menjawab Baik sebanyak 19 orang atau 76%, kemudian Cukup Baik sebanyak 4 atau 16% dan Kurang Baik sebanyak 2 orang atau 8%. Jadi rata - rata responden menjawab Baik atas “Mengarahkan masyarakat agar dapat mengasah kemampuan intelektual individu maupun kelompok”, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah melaksanakan pemberian wawasan dan keterampilan dalam mengasah kemampuan individu maupun kelompok masyarakat petani ikan dengan cukup baik.

Dan jawaban responden tentang “Menciptakan kemampuan inovatif masyarakat agar tanggap dalam menyelesaikan masalah dan peningkatan keterampilan”. Responden yang menjawab Baik sebanyak 22 orang atau 88%, kemudian Cukup Baik sebanyak 2 orang atau 8% dan Kurang Baik sebanyak 1 orang atau 4%. Jadi rata - rata responden menjawab Baik atas “Menciptakan kemampuan inovatif masyarakat agar tanggap dalam menyelesaikan masalah dan peningkatan keterampilan”, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah melaksanakan pemberdayaan dengan baik.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Ir. Usman Amin yang diwakili oleh Sekretaris yaitu Bapak Zulfahmi, S.Pi, M.Si. Menyatakan bahwa :

“Setiap ada pameran atau expo kita membantu mempromosikan hasil perikanan Kabupaten Kampar keseluruh Indonesia seperti Jakarta, Surabaya,

Makasar sampai Kalimantan. Alhamdulillah beberapa waktu lalu Dinas Perikanan Kabupaten Kampar mewakili Riau untuk lomba memasak ikan di Bogor pada program Dinas Kelautan dan Perikanan dan membawa hasil yang bagus yaitu memenangkan lomba tersebut dengan meraih juara 3 di tingkat nasional.”

Kemudian hasil wawancara dengan kepala seksi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar Nelzudi, SP menyatakan bahwa :

“Tergantung pada program yang sedang dilaksanakan, seperti jika yang dilaksanakan adalah program pakan bermutu maka kita akan mengumpulkan kelompok yang menggunakan pakan pelet, kalau dibidang penangkapan maka akan kita kelompokkan dengan kelompok penangkap dan memberikan sosialisasi agar usaha mereka berkembang. Dan kalau kita adakan program pemberdayaan tentang pembenihan maka kita akan mengumpulkan kelompok di Kabupaten kampar ini yang memiliki usaha pembenihan. Guna untuk memajukan usaha mereka disegala bidang usaha masing – masing.”

Hasil Wawancara dengan Seksi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan Kabupaten Kampar Bapak Gazali, R. S.PKP, menyatakan bahwa :

“Pembinaan yang dilakukan selalu bertahap seperti pembinaan pada kelompok pembibitan, lalu kelompok pengolahan agar mereka mendapatkan pembelajaran ditiap bidang usaha yang mereka jalani.”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan kepala Desa Koto Mesjid Bapak Arjunalis, menyatakan Bahwa :

“Pada pemberian motivasi – motivasi hingga pemberian pengetahuan untuk melihat peluang yang harus dicapai, itu sejauh ini telah terlaksana dengan baik. Hanya saja sekali lagi kendala yang dihadapi adalah dana yang terbatas, karena sifat dari dana program pemberdayaan ini adalah bergulir maka tidak semua kelompok mendapatkannya. Jadi hanya beberapa kelompok saja yang betul – betul bisa mencapai peluang yang telah ditargetkan tersebut hingga mendapatkan hasil yang diinginkan.”

Dari hasil uraian penelitian diatas, maka penulis dapat memperoleh hasil yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut ini :

Tabel V.6 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan

No	Indikator penelitian	Kategori Pengukuran (Orang)			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyadaran	16 (64%)	6 (24%)	3 (12%)	25
2	Penyuluhan	12 (48%)	9 (36%)	4 (16%)	25
3	Peningkatan kemampuan	20 (80%)	4 (16%)	1 (4%)	25
Jumlah		48	19	8	75
Rata – rata		16	6	3	25
Persentase		64%	24%	12%	100%

Sumber: hasil penelitian lapangan, 2018.

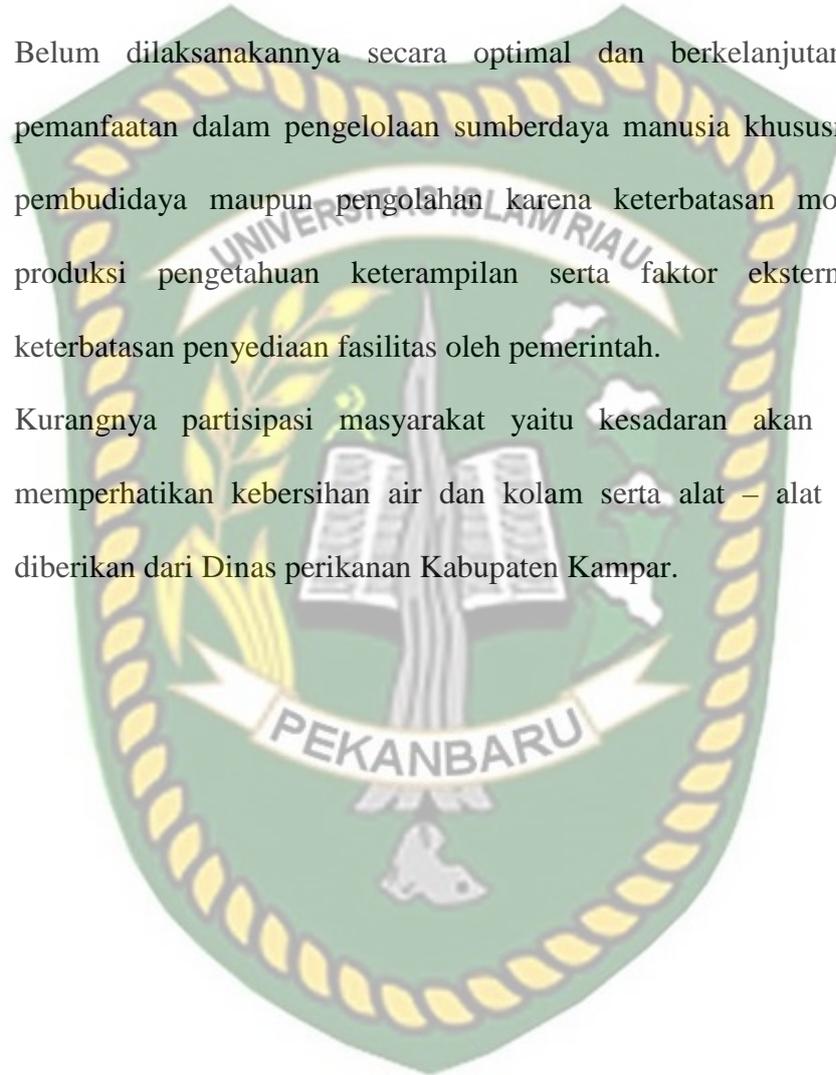
Melalui tabel rekapitulasi diatas, dapat diketahui tanggapan responden terhadap peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam Pemberdayaan

Masyarakat Petani Ikan di Desa Koto Mesjid, rata – rata 16 orang atau sekitar 64% memberikan penilaian Baik, kemudian rata – rata 6 orang atau sekitar 24% memberikan penilaian Cukup Baik, dan rata – rata 3 orang atau sekitar 12% memberikan penilaian Kurang Baik. Oleh karena itu berdasarkan penilaian responden tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan di Desa Koto Mesjid penilaian tertinggi rata – rata 16 orang atau sekitar 64% dan berada pada kategori “Baik”. Sejauh ini pegawai atau perangkat yang berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut telah melaksanakan program dengan ketentuan, namun pemberdayaan yang diberikan perlu ditingkatkan lagi khususnya dari segi sarana dan prasarana serta pengawasan yang lebih dari petugas lapangan dalam mengawasi serta membina masyarakat petani ikan agar menghasilkan produk – produk olahan yang lebih berkualitas.

C. Faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani ikan di Desa Koto mesjid oleh dinas Perikanan Kabupaten Kampar

Pelaksanaan program pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar kepada Masyarakat petani ikan di Desa Koto mesjid kecamatan XIII Koto kampar tentunya masih terdapat beberapa kendala yang masih dirasakan baik itu oleh pihak pegawai Dinas Perikanan maupun masyarakat itu sendiri. Bila dicermati pelaksanaan pemberdayaan tersebut masih terdapat beberapa titik kelemahan diantaranya :

1. Belum dikelolanya potensi sumberdaya manusia khususnya perikanan secara optimal sebagai suatu usaha yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat.
2. Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dalam pengelolaan sumberdaya manusia khususnya bidang pembudidaya maupun pengolahan karena keterbatasan modal sarana produksi pengetahuan keterampilan serta faktor eksternal seperti keterbatasan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat yaitu kesadaran akan pentingnya memperhatikan kebersihan air dan kolam serta alat – alat yang telah diberikan dari Dinas perikanan Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan penjelasan mengenai pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa peran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yaitu memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan – kegiatan maupun program – program pemberdayaan masyarakat meliputi pertemuan dan pengorganisasian masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mau berkontribusi terhadap program tersebut.

Melakukan pelatihan – pelatihan yang bersifat vocational. Jenis – jenis pemberdayaan masyarakat yang diberikan diantaranya adalah pemberian pengetahuan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam rangka upaya meningkatkan kualitas masyarakat atau kelompok, pemberian bantuan seperti peralatan yang dibutuhkan, pakan serta pemberian bibit. Maka penulis mengambil kesimpulan peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani ikan di Desa Koto Mesjid kecamatan XIII Koto Kampar cukup baik, penilaian ini berdasarkan responden dengan rata – rata 16 orang atau sekitar 64% dan berada pada kategori “Sudah” atau telah terlaksana dengan cukup baik, dan juga berdasarkan wawancara serta observasi yang dilakukan oleh penulis.

Penilaian ini berdasarkan hasil rekapitulasi dari beberapa indikator penilaian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk indikator Penyadaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani ikan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto kampar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dapat dikategorikan “Cukup Baik” dengan tanggapan responden tertinggi rata – rata 16 orang atau sekitar 64%.
2. Untuk indikator Penyuluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani ikan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto kampar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dapat dikategorikan “Cukup Baik” dengan tanggapan responden tertinggi rata – rata 12 orang atau sekitar 48%.
3. Untuk indikator Peningkatan Kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani ikan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto kampar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dapat dikategorikan “Baik” dengan tanggapan responden tertinggi rata – rata 20 orang atau sekitar 80%.
4. Faktor penghambat Belum dikelolanya potensi sumberdaya manusia khususnya perikanan secara optimal. Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dalam pengelolaan sumberdaya manusia khususnya bidang pembudidaya maupun pengolahan karena keterbatasan modal sarana produksi. Kurangnya partisipasi masyarakat yaitu kesadaran akan pentingnya memperhatikan kebersihan

air dan kolam serta alat – alat yang telah diberikan dari Dinas perikanan Kabupaten Kampar.

B. Saran

Dari analisis data dan informasi yang berkaitan dengan peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan di desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar, dengan melihat pandangan agar pemberdayaan masyarakat petani ikan dapat dilakukan lebih baik lagi kedepannya, maka penulis dapat mengemukakan saran – saran berdasarkan faktor penghambat yaitu belum dikelolanya potensi sumberdaya manusia khususnya perikanan secara optimal. Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dalam pengelolaan sumberdaya manusia khususnya bidang pembudidaya maupun pengolahan karena keterbatasan modal sarana produksi. Kurangnya partisipasi masyarakat yaitu kesadaran akan pentingnya memperhatikan kebersihan air dan kolam serta alat – alat yang telah diberikan dari Dinas perikanan Kabupaten Kampar.

Dari faktor – faktor penghambat diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh pegawai yang terkait pada pelaksanaan program pemberdayaan agar dapat memaksimalkan kinerja dalam melaksanakan pemberdayaan pada masyarakat petani ikan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Kampar.

2. Diharapkan kepada pemerintah daerah dan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar untuk selalu memperhatikan serta mengawasi mutu dan mengupayakan peningkatan anggaran di bidang perikanan.
3. Diharapkan untuk lebih meningkatkan kerjasama atau saling koordinasi antara masyarakat petani ikan dengan aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan program pemberdayaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim, Theresia Damayanti, 2007. Manajemen Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta:Penerbit UPP STIM YKPN
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Assauri, Sofyan, 2004. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep Dan Strategi. PT.
Jakarta: Grafindopersada
- Darwis, Herman, 2009. “*corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*
”*jurnal Keuangan dan perbankan,vol. 13, No. 13, September 2009.*
- Fathoni,Abdurahmat,2006.*Manajemen Sumber Daya Manusia.*Jakarta:PT Rineka
Cipta.
- Gomes, Faustino Cardoso, 2003. Manajemen Manusia. Jakarta : Andi Offset.
- Handoko, T. Hani, 2003. Manajemen personaliadnan sumber daya manusia,
Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Hamim, Sufian dan Indra Mukhlis Adnan, 2005. *Administrasii, Organisasi dan*
Manajemen, suatu ilmu teori konsep dan aplikasi. Multigrafindo,
Pekanbaru.
- Hasibuan, Melayu, S P, (1995), Manajemen Sumber Daya Manusia ; Dasar dan
Kunci Keberhasilan, Jakarta : Toko Gunung Agung.

_____ 2006, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Ceatakan Kedelapan, Bumi Askara:Jakarta

_____ 2013, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Prenhallindo

Kusnadi, 1999, *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*, Malang: Universitas Brawijaya

Manuwoto, 1998, *Peningkatan Pesan Serta Upaya Pemberdayaan masyarakat dalam menuju masyarakat madani*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Miftah, Toha. (2003) *Perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada.u

Ndraha, taliziduhu, .2003. *Kybernologi, sebuah Kontruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Bandung.

_____ .2011. *Kybernologi: sebuah kontruksi Ilmu pemerintahan*. Rineka

Cipta. Bandung.

Nawawi, Ismail, 2009. *Prilaku Administrasi Neagara*. Surabaya: Its Press

Nawawi, Hadari, 2008. *Manajamenen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Gadjah

Mada. Universitas Pres..

Poerwadinata, 2002., "Kamus besar bahasa indonesia", Depdiknas, Edisi, III.

Cetak Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Robbin.P.Stephen.1994.*Teori Organisasi*.Jakarta:Arcan.

Salam,DharmaSetiawan.2004,*Manajemen Pemerintahan Indonesia*,Jakarta:

Djamberan, Edisi Repisi

Siagian,SondangP.2003.*filsafat Administrasi*. Jakarta, PT. Gunung Agung,Jakarta.

Sinamora, Henry. 2001. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta : bumi Aksara

Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi suatu pengantar* Jakarta, Raja Grafindo

Persada.

_____.2006 “sosiologi” jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sumaryadi. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.

Sunyoto,Danang,2012.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta:Bumi Askara.

_____,2013.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta:PT Rieneka

Cipta.

Suharto,Edi.2009,*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,Bandung:

Refika Aditama.

Syafiie, Kencana Inu. 2011. *Manajemen pemerintahan*. Jakarta PT. Rineka Cipta

_____. 2005. *Pengazntar ilmu pemerintahan*. Bandung, Rafika

Aditama.

_____. 2007. Ilmu Pemerintahan. Bandung, Mandar Maju.

Sumaryadi Nyoman. 2010. Sosiologi pemerintahan, Bogor. Ghalia Indonesia

Tanjung H. Bandin Nur Tanjung & H. Ardial. 2009. Pedoman penulisan karya ilmiah. (Proposal, Skripsi dan tesis) Jakarta: Kencana

Dokumentasi :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:9)

Kamus besar Bahasa Indonesia (1990:37)

Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.02/MEN/2007

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar .

Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Skripsi Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupetn Rokan Hilir dalam Pemberdayakan Nelayan Kecil pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Kampar oleh Yusuf Anuari tahun 2015.